

WISNU B. SOEWITO & REKAN
REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS
License No. : KEP-183/KM.6/2004



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

***THE AUDIT BOARD OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA***

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

ATAS
ON

LAPORAN KEUANGAN
FINANCIAL STATEMENT

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
FOR THE YEARS ENDED

31 DESEMBER 2014 DAN 2013
DECEMBER 31, 2014 AND 2013

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

***THE AUDIT BOARD OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA***

**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
*INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT***

**ATAS
*ON***

**LAPORAN KEUANGAN
*FINANCIAL STATEMENT***

**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
*FOR THE YEARS ENDED***

**31 DESEMBER 2014 DAN 2013
*DECEMBER 31, 2014 AND 2013***

DAFTAR ISI / TABLE OF CONTENTS

	<u>Halaman / Page</u>	
Laporan Auditor Independen	1 - 2	<i>Independent Auditor's Report</i>
Neraca	1	<i>Balance Sheet</i>
Laporan Realisasi Anggaran	2	<i>Statement Of Budget Realization</i>
Catatan Atas Laporan Keuangan	3 - 25	<i>Notes To The Financial Statements</i>

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

**SURAT PERNYATAAN SEKRETARIS JENDERAL
THE SECRETARY-GENERAL STATEMENT**

**TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2014**

**THE RESPONSIBILITY FOR
FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2014**

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
THE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hendar Ristriawan
Alamat kantor : Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 31,
Jakarta Pusat 10210
Jabatan : Sekretaris Jenderal
Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia (BPK RI)

The undersigned:

Name : Hendar Ristriawan
Office Address : Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 31,
Jakarta Pusat 10210
Job Title : Secretary General
of The Audit Board of
The Republic of Indonesia (BPK RI)

Menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan BPK RI tahun anggaran 2014 yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Laporan Keuangan BPK RI telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan BPK RI telah dimuat secara lengkap dan benar.
b. Laporan Keuangan BPK RI tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan
4. Bertanggung jawab atas kepatuhan BPK RI terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern.

Declare that:

1. Responsible for the preparation and presentation of Financial Statement of BPK RI, budget year 2014 that consist of Balance Sheet, Statement of Budget Realization and Notes to the Financial Statements.
2. Financial Statement of BPK RI have been prepared and presented in accordance with Government Accounting Standards in Indonesia.
3. a. All information have been fully and correctly disclosed in Financial Statements of BPK RI.
b. The Financial Statements of BPK RI do not contain false material information or fact nor do they omit material or facts; and
4. Responsible for BPK RI compliance to the regulations and internal control.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement is confirmed to the best of our knowledge and belief.

Jakarta,

22 Mei 2015/May 22, 2015



LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

No. 043/LAI/WBS/V/2015

Kepada Yang Terhormat:

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI,
dan

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

No. 043/LAI/WBS/V/2015

To the Honorable:

Chairman of The House of Representatives of
The Republic of Indonesia, and
Chairman of The Audit Board of
The Republic of Indonesia

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA / THE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

Kami telah mengaudit laporan keuangan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terlampir, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2014 dan laporan realisasi anggaran untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta suatu ringkasan kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penielasan lain.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas.

We have audited the accompanying financial statement of the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK RI), which comprise the balance sheet as of December 31, 2014 and the statement of budget realization for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Government Accounting Standards in Indonesia, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants and State Auditing Standards issued by the Audit Board of the Republic of Indonesia. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control.

Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan dasar bagi opini kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tanggal 31 Desember 2014 dan realisasi anggaran untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan di Indonesia.

Hal lain

Laporan keuangan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tanggal 31 Desember 2013 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini tanpa modifikasi atas laporan keuangan tersebut dalam laporannya No. LAI/GA/14051 tanggal 30 April 2014.

Laporan atas ketentuan peraturan perundang-undangan

Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Intern serta Tindak Lanjut atas Hasil Audit Tahun Sebelumnya kami sampaikan dalam laporan secara terpisah kepada manajemen dengan laporan kami No.044/LAI/WBS/V/2015 tanggal 22 Mei 2015, No.045/LAI/WBS/V/2015 tanggal 22 Mei 2015 dan No.046/LAI/WBS/V/2015 tanggal 22 Mei 2015.

An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Audit Board of the Republic of Indonesia as of December 31, 2014, and budget realization for the year then ended, in accordance with Government Accounting Standards in Indonesia.

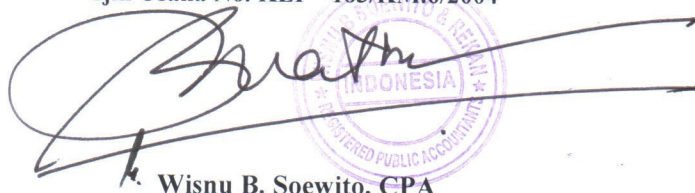
Other matter

The financial statement of the Audit Board of the Republic of Indonesia as of December 31, 2013 and for the year then ended were audited by another independent auditor who expressed an unmodified opinion on those statements No. LAI/GA/14051 dated April, 30, 2014.

Report on other legal and regulatory requirement

Compliance with Laws and Regulations and the Internal Control and Audit Follow-up over previous year we submitted in separate reports to the management with our report No.044/LAI/WBS/V/2015 dated May 22, 2015, No.045/LAI/WBS/V/2015 dated May 22, 2015 and No.046/LAI/WBS/V/2015 dated May 22, 2015.

**KANTOR AKUNTAN PUBLIK
WISNU B. SOEWITO & REKAN
Ijin Usaha No. KEP - 183/KM.6/2004**



Wisnu B. Soewito, CPA

Nomor Register Akuntan Publik: AP. 0360 /
Public Accountant Registration Number: AP. 0360
Nomor Ijin Kantor Akuntan Publik: KEP-183/KM.6/2004 /
License No. : KEP-183/KM.6/2004

**Jakarta, 22 Mei 2015/
Jakarta, May 22, 2015**

The accompanying notes to financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 Desember 2014 dan 2013
(Disajikan dalam Rupiah)

THE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
STATEMENT OF BUDGET REALIZATION
FOR THE YEARS ENDED
December 31, 2014 and 2013
(Expressed in Rupiah)

	Catatan/ Notes	2014			2013			
		Anggaran/ Budget	Realisasi/ Realization	%	Anggaran/ Budget	Realisasi/ Realization	%	
PENDAPATAN	2.a, 3							REVENUES
PENDAPATAN DALAM NEGERI								DOMESTIC REVENUES
Penerimaan Perpajakan		-	-	-	-	-	-	Tax Incomes
Penerimaan Negara Bukan Pajak		1.161.900.000	24.503.525.195	2.108,92	1.014.093.000	21.409.853.927	2.111,23	Non - Tax Incomes
PENDAPATAN HIBAH	2.b, 4	-	-	-	-	-	-	GRANT REVENUES
JUMLAH PENDAPATAN		1.161.900.000	24.503.525.195	2.108,92	1.014.093.000	21.409.853.927	2.111,23	TOTAL REVENUES
BELANJA								EXPENDITURES
TRANSAKSI KAS								CASH TRANSACTIONS
Belanja Pegawai		971.722.157.000	817.812.034.666	84,16	905.681.364.000	729.682.923.966	80,57	Employee Expenditures
Belanja Barang		1.313.621.857.000	1.172.005.735.636	89,22	1.390.043.565.000	1.166.170.840.337	83,89	Goods Expenditures
Belanja Modal		310.936.024.000	308.149.918.184	99,10	535.869.486.000	490.011.420.195	91,44	Capital Expenditures
Subsidi		-	-	-	-	-	-	Subsidies
Hibah		-	-	-	-	-	-	Grants
Bantuan Sosial		-	-	-	-	-	-	Social Aids
Belanja Lain-lain		-	-	-	-	-	-	Other Expenditures
TRANSAKSI NON KAS								NON CASH TRANSACTIONS
Belanja Pegawai		-	-	-	-	-	-	Employee Expenditures
Belanja Barang		-	8.563.964.460	-	-	-	-	Goods Expenditures
Belanja Modal		-	-	-	-	-	-	Capital Expenditures
Subsidi		-	-	-	-	-	-	Subsidies
Hibah		-	-	-	-	-	-	Grants
Bantuan Sosial		-	-	-	-	-	-	Social Aids
Belanja Lain-lain		-	-	-	-	-	-	Other Expenditures
JUMLAH BELANJA		2.596.280.038.000	2.306.531.652.946	88,84	2.831.594.415.000	2.385.865.184.498	84,26	TOTAL EXPENDITURES
PEMBIAYAAN								FINANCING
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)								DOMESTIC FINANCING - NET
Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan		-	-	-	-	-	-	Domestic Borrowing - Banking Sector
Non Perbankan Dalam Negeri		-	-	-	-	-	-	Non Banking - Domestic Borrowing
PENERIMAAN PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)								FOREIGN FINANCING - NET
Penerimaan Pinjaman Luar Negeri		-	-	-	-	-	-	Receipt of Borrowing from Overseas
Pembayaran Cicilan Pokok Hutang Luar Negeri		-	-	-	-	-	-	Disbursement of Principal from Overseas
JUMLAH PEMBIAYAAN		-	-	-	-	-	-	TOTAL FINANCING

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 Desember 2014 dan 2013
(Disajikan dalam Rupiah)

THE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
December 31, 2014 and 2013
(Expressed in Rupiah)

1. Umum

General 1.

a. Pendirian

Establishment a.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ("BPK RI") berdiri di Magelang pada tanggal 28 Desember 1946 berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor 11/ OEM dan mulai bekerja pada tanggal 1 Januari 1947. Dalam kondisi revolusi, kantor BPK RI menumpang dan berpindah-pindah. Terakhir menempati gedung di Jalan Tugu No. 2 Yogyakarta.

The Audit Board of the Republic of Indonesia ("BPK RI") was established in Magelang on December 28, 1946 under Governmental Decree NO. 11/ OEM and started its operations on January 1, 1947. During the revolution, BPK RI shared its office with other offices and constantly moving from one place to another. The last building used as office was on Jalan Tugu No. 2 Yogyakarta.

Dengan dibentuknya Negara Republik Indonesia Serikat (RIS), dibentuk Dewan Pengawas Keuangan berdasarkan Konstitusi RIS. Kemudian dengan berdirinya Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS 1950), maka dibentuk Dewan Pengawas Keuangan Republik Indonesia yang merupakan gabungan dari Dewan Pengawas Keuangan RIS di Bogor dan BPK RI di Yogyakarta. Keadaan ini berlangsung sampai dengan tahun 1959.

Following the establishment of the United States of the Republic of Indonesia (RIS), Financial Supervisory Board was formed under the RIS Constitution. After the establishment of the Republic of Indonesia under the Provisional Constitution of 1950 (UUDS 1950), Financial Supervisory Board of the Republic of Indonesia was established as the consolidation of RIS Financial Supervisory Board in Bogor and BPK RI in Yogyakarta. This condition continued until 1959.

Sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden RI pada tanggal 5 Juli 1959 yang menyatakan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), maka sesuai ketentuan UUD 1945 pasal 23 ayat 5, nama Dewan Pengawas Keuangan kembali menjadi BPK RI. Selama periode ini, Pemerintah Indonesia dan BPK RI berusaha sekuatnya untuk mewujudkan Undang-Undang tentang BPK RI sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 23 ayat 5. Sementara itu telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 7 Tahun 1963 dan Perppu No. 6 Tahun 1964 tentang BPK Gaya Baru.

Due to issuance of Presidential Decree on July 5, 1959 declaring the reinstatement of the 1945 Constitution, and in accordance with Article 23 paragraph 5 of the 1945 Constitution, the name 'Financial Supervisory Board' was rechanged into BPK RI. During this period, both the Indonesian Government and BPK RI tried their best to formulate a Law regarding BPK RI that is in accordance with the mandate in Article 23 paragraph 5 of the 1945 Constitution. Meanwhile, Government Regulation in Lieu of Law (Perpu) No. 7 of 1963 and Perpu No. 6 of 1964 regarding BPK Gaya Baru (New-Style Audit Board) were issued.

BPK RI sendiri telah berusaha membahas Perppu No. 6 Tahun 1964 untuk menjadikannya sebagai Undang-Undang, yaitu dengan menyusun konsep Rancangan Undang-Undang tentang BPK RI, yang kemudian setelah diajukan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), disetujui dan disahkan menjadi Undang-Undang No. 17 Tahun 1965. Dengan begitu, BPK RI berubah menjadi BPK Gaya Baru yang berada di bawah Presiden/ Pemimpin Besar Revolusi. Namun kemudian dengan ketetapan MPRS No. X/MPRS 1966, tanggal 5 Juli 1966, kedudukannya dikembalikan pada posisi dan fungsinya sesuai dengan yang diatur dalam UUD 1945.

BPK RI itself had tried to discuss Perpu No. 6 of 1964 to be stipulated as a Law by formulating a draft of Law regarding BPK RI, which after being filed by the Government to the People's Legislative Assembly (DPR) was approved and ratified as Law No. 17 of 1965. Therefore, BPK RI changed into BPK Gaya Baru under the President/Great Leader of Revolution. Later on, under the Decree of MPRS (Provisional People's Consultative Assembly) No. X/MPRS 1966 dated July 5, 1966, it was reinstated to its position and function as regulated in the 1945 Constitution.

Pada tahun 1973 dikeluarkan Undang-Undang (UU) No. 5 Tahun 1973 tentang BPK RI, yang mengganti dan mencabut UU No. 17 Tahun 1965. Pada tahun 2006, UU No. 5 Tahun 1973 tersebut telah diganti dengan UU No. 15 Tahun 2006. UU inilah yang menjadi dasar keberadaan BPK RI saat ini.

In 1973, Law No. 5 of 1973 regarding BPK RI was issued, substituting and revoking Law No. 17 of 1965. In 2006, Law No. 5 of 1973 was substituted with Law No. 15 of 2006. This Law has become the ground for the existence of BPK RI.

b. Susunan Keanggotaan dan Bentuk Organisasi BPK RI

Board Members and Organizational Structure of BPK RI b.

Anggota BPK RI dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPR dan diresmikan oleh Presiden. Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2006 yang merupakan pengganti UU No. 5 Tahun 1973, BPK RI mempunyai 9 (sembilan) orang anggota yang keanggotaannya diresmikan dengan Keputusan Presiden. Sembilan anggota ini terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota dan 7 (tujuh) orang anggota.

Board Members are selected by DPR by taking into account the consideration of DPR and are officially ratified by the President. Pursuant to Law No. 15 of 2006, substitute to Law No. 5 of 1973, BPK RI has 9 (nine) members whose membership are officially ratified in a Presidential Decree. These members consist of a chairman concurrently serving as a member, a vice chairman concurrently serving as a member, and 7 (seven) members.

Susunan keanggotaan BPK RI pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

The board members of BPK RI as of December 31, 2014 and 2013 consists of the following:

	2014
Ketua :	Dr. H. Harry Azhar Azis, M.A.
Wakil Ketua :	Drs. Sapto Amal Damandari, Ak, C.P.A.
Anggota I :	Dr. Agung Firman Sampurna, S.E., M.Si.
Anggota II :	Agus Joko Pramono, M.Acc., Ak.
Anggota III :	Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi
Anggota IV :	Prof. Dr. H. Rizal Djilil, M.M
Anggota V :	Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, SE Ak, MM, CPA
Anggota VI :	Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A.
Anggota VII :	Achsanal Qosasi

	2013
Drs. Hadi Purnomo, Ak.	: Chairman
Hasan Bisri, S.E., M.M.	: Vice Chairman
Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, SE Ak, MM, CPA	: Board Member I
Drs. Sapto Amal Damandari, Ak., C.P.A.	: Board Member II
Agus Joko Pramono, M.Acc., Ak.	: Board Member III
Dr. Ali Masykur Musa, M.Si., M.Hum.	: Board Member IV
Dr. Agung Firman Sampurna, S.E., M.Si.	: Board Member V
Prof. Dr. H. Rizal Djilil, M.M	: Board Member VI
Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A.	: Board Member VII

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 Desember 2014 dan 2013
(Disajikan dalam Rupiah)

THE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
December 31, 2014 and 2013
(Expressed in Rupiah)

1. Umum (lanjutan)

c. Tempat Kedudukan BPK RI

Dalam melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab Pemerintah tentang keuangan negara, BPK RI dibantu oleh pelaksana BPK RI. Saat ini, pelaksana BPK RI terdiri dari 1 (satu) Sekretariat Jenderal, 1 (satu) Inspektorat Utama, 2 (dua) Direktorat Utama, 7 (tujuh) Auditorat Utama Keuangan Negara, dan 5 (lima) Staf Ahli.

BPK RI Pusat berdomisili di Jalan Gatot Subroto No. 31, Jakarta Pusat, dan memiliki Kantor Perwakilan dan Satuan Kerja (satker) sebagai berikut:

- Sekretariat Jenderal BPK RI dan BPK RI Pusat, Jl. Gatot Subroto Kav. 31 Jakarta.
- Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, Jl. Binawarga II, Jakarta Selatan.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Jl. Imam Bonjol No. 22, Medan.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, Jl. Demang Lebar Daun No. 2, Palembang.
- BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, Jl. MT. Haryono Kav. 34, Pancoran, Jakarta Selatan.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jl. HOS Cokroaminoto No. 52, Yogyakarta.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Bali, Jl. D.I. Panjaitan, Renon, Denpasar.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, Jl. A Yani km. 32,5, Banjarbaru, Banjarmasin.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Jl. Andi Pangeran Pettarani, Makassar.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Papua, Jl. Balaikota No.2, Entrop Jayapura.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh, Jl. Panglima Nyak Makam No. 38, Banda Aceh.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, Jl. Jenderal Sudirman No. 721, Pekanbaru.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Jl. Moh Toha No. 164, Bandung.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Jl. Raya Juanda, Sidoarjo, Surabaya.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Jl. Ahmad Yani No. 121, Pontianak.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, Jl. 17 Agustus No.4, Manado.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, Jl. Moh. Yamin No. 19, Samarinda.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, Jl. Sao - Sao No. 10, Kendari.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, Jl. Yos Sudarso No. 16, Palangkaraya.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Barat, Jl. Sowi Gunung No.4, Manokwari.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku, Jl. Laksdya Leo Wattimena, Passo, Ambon.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, Jl. Pangeran Emir M. Noor No.11B, Sumur Putri, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara, Jl. Monomotu No. 12, Ternate.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jl. Amabi No. 120, Kupang.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi, Jl. P. Hidayat Km 6,5 No. 65, Kel. Sukakarya, Kota Baru, Jambi.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, Jl. Khatib Sulaiman No. 54, Padang.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, Jl. Kartini I No. 29-30 Sekupang, Batam.

General (continued) 1.
BPK RI Working Units c.

In conducting state financial management and accountability audit, BPK RI is assisted by implementers. At present, Implementers of BPK RI are Secretariat General, Principal Inspectorate, 2 (two) Principal Directorates, 7 (seven) Principal Auditorates, and 5 (five) Expert Staffs.

BPK RI Headquarter is located at Jalan (Jl.) Gatot Subroto No. 31, Central Jakarta. BPK RI has Representative Offices and other Working Units (satker) as follows:

- Secretariat General of BPK RI and BPK RI Headquarter, Jl. Gatot Subroto Kav. 31, Jakarta.*
- Education and Training Center, Jl. Binawarga II, South Jakarta.*
- BPK RI Representative Office in Sumatera Utara, Jl. Imam Bonjol No. 22, Medan.*
- BPK RI Representative Office in Sumatera Selatan, Jl. Demang Lebar Daun No. 2, Palembang.*
- BPK RI Representative Office in DKI Jakarta, Jl. MT. Haryono Kav. 34, Pancoran, South Jakarta.*
- BPK RI Representative Office in Daerah Istimewa Yogyakarta, Jl. HOS Cokroaminoto No. 52, Yogyakarta.*
- BPK RI Representative Office in Bali, Jl. D.I. Panjaitan, Renon, Denpasar.*
- BPK RI Representative Office in Kalimantan Selatan, Jl. A. Yani km. 32,5, Banjarbaru, Banjarmasin.*
- BPK RI Representative Office in Sulawesi Selatan, Jl. Andi Pangeran Pettarani, Makassar.*
- BPK RI Representative Office in Papua, Jl. Balaikota No.2, Entrop, Jayapura.*
- BPK RI Representative Office in Aceh, Jl. Panglima Nyak Makam No. 38, Banda Aceh.*
- BPK RI Representative Office in Riau, Jl. Jenderal Sudirman No. 721, Pekanbaru.*
- BPK RI Representative Office in Jawa Barat, Jl. Moh Toha No. 164, Bandung.*
- BPK RI Representative Office in Jawa Timur, Jl. Raya Juanda, Sidoarjo, Surabaya.*
- BPK RI Representative Office in Kalimantan Barat, Jl. Ahmad Yani No. 121, Pontianak.*
- BPK RI Representative Office in Sulawesi Utara, Jl. 17 Agustus No. 4, Manado.*
- BPK RI Representative Office in Kalimantan Timur, Jl Moh. Yamin No. 19, Samarinda.*
- BPK RI Representative Office in Sulawesi Tenggara, Jl. Sao - Sao No.10, Kendari.*
- BPK RI Representative Office in Kalimantan Tengah, Jl. Yos Sudarso No. 16, Palangkaraya.*
- BPK RI Representative Office in Papua Barat, Jl. Sowi Gunung No. 4, Manokwari.*
- BPK RI Representative Office in Maluku, Jl. Laksdya Leo Wattimena, Passo, Ambon.*
- BPK RI Representative Office in Lampung, Jl. Pangeran Emir M. Noor No. 11 B, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung.*
- BPK RI Representative Office in Maluku Utara, Jl. Monomotu No. 12, Ternate.*
- BPK RI Representative Office in Nusa Tenggara Timur, Jl. Amabi No. 120, Kupang.*
- BPK RI Representative Office in Jambi, Jl. P. Hidayat Km 6,5 No. 65, Kel. Sukakarya, Kota Baru, Jambi.*
- BPK RI Representative Office in Sumatera Barat, Jl. Khatib Sulaiman No. 54, Padang.*
- BPK RI Representative Office in Kepulauan Riau, Jl. Kartini I No.29 - 30 Sekupang, Batam.*

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 Desember 2014 dan 2013
(Disajikan dalam Rupiah)

THE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
December 31, 2014 and 2013
(Expressed in Rupiah)

1. Umum (lanjutan)

c. Tempat Kedudukan BPK RI (lanjutan)

- BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Jl. Udayana No. 22, Mataram.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, Jl. Prof Moh. Yamin No. 35, Palu.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo, Jl. Tina Loga No.3, Kota Utara, Gorontalo.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu, Jl. Pembangunan No. 16, Padang Harapan, Bengkulu.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jl. Pulau Bangka, Kompleks Perkantoran Terpadu, Air Itam, Pangkal Pinang.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Banten, Jl. Raya Palka No. 1, Palima, Serang, Banten.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Jl. Perintis Kemerdekaan No. 175, Semarang.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, Jl. H. Abdul Malik Pattana Endeng, Kec. Simboro, Mamuju.

General (continued) 1.
BPK RI Working Units (continued) c.

- BPK RI Representative Office in Nusa Tenggara Barat, Jl. Udayana No. 22, Mataram.* -
- BPK RI Representative Office in Sulawesi Tengah, Jl. Prof Moh. Yamin No. 35, Palu.* -
- BPK RI Representative Office in Gorontalo, Jl. Tina Loga No. 3, Kota Utara, Gorontalo.* -
- BPK RI Representative Office in Bengkulu, Jl. Pembangunan No. 16, Padang Harapan, Bengkulu.* -
- BPK RI Representative Office in Kepulauan Bangka Belitung, Jl. Pulau Bangka, Kompleks Perkantoran Terpadu, Air Itam, Pangkal Pinang.* -
- BPK RI Representative Office in Banten, Jl. Raya Palka No. 1, Palima, Serang, Banten.* -
- BPK RI Representative Office in Jawa Tengah, Jl. Perintis Kemerdekaan No. 175, Semarang.* -
- BPK RI Representative Office in Sulawesi Barat, Jl. H. Abdul Malik Pattana Endeng, Kec. Simboro, Mamuju.* -

d. Dasar Hukum BPK RI

Ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum kegiatan BPK RI adalah:

- Pasal 23 E, Pasal 23 F dan Pasal 23 G Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014.
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.

Legal Basis of BPK RI d.

Laws and regulations serving as the legal basis of BPK RI activities are as follows:

- Article 23 E, Article 23 F and Article 23 G of the 1945 Constitution.* -
- Law No. 15 of 2006 regarding of the Audit Board of the Republic of Indonesia.* -
- Law No. 1 of 2004 regarding State Treasury.* -
- Law No. 17 of 2003 regarding State Finance.* -
- Law No. 15 of 2004 regarding Audit on State Financial Management and Accountability.* -
- Law No.23 of 2013 regarding State Budget For the Year 2014.* -
- Law No. 12 of 2014 regarding Amendment of Law No. 23 of 2013 regarding State Budget For the Year 2014.* -
- Government Regulation No. 8 of 2006 regarding the Financial and Performance Reporting for Government Agencies.* -
- Government Regulation No. 71 of 2010 regarding Government Accounting Standards.* -
- Minister of Finance Regulation No.171/PMK.05/2007 as amended by Minister of Finance Regulation No. 233/PMK.05/2011 on Amendment to the Minister of Finance Regulation No.171/PMK.05/2007 regarding Accounting and Financial Reporting System of the Central Government.* -
- Minister of Finance Regulation No.120/PMK.06/2007 regarding Administration of State Property* -
- Minister of Finance Regulation No.238/PMK.05/2011 regarding the Guidelines for Government Accounting System.* -
- Minister of Finance Regulation No.1/PMK.06/2013 regarding Depreciation of State-Owned Fixed Assets in Central Government Entity.* -
- Minister of Finance Regulation No.214/PMK.05/2013 regarding of the Standard Chart of Accounts.* -
- Minister of Finance Regulation No.90/PMK.06/2014 regarding Amandemend the Regulation of the Minister of Finance No. 1 / PMK.06/2013 on State Assets Depreciation of Fixed Assets From of the Central Government Entities.* -
- Minister of Finance Regulation No.69/PMK.06/2014 regarding Determination of Accounts Receivable Quality and Allowance for Doubtful Accounts the Formation of the Ministry/Agency and the State Treasurer.* -

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 Desember 2014 dan 2013
(Disajikan dalam Rupiah)

THE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
December 31, 2014 and 2013
(Expressed in Rupiah)

1. Umum (lanjutan)

d. Dasar Hukum BPK RI (lanjutan)

- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KM.6/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KM.6/2013 tentang Tabel Masa Manfaat.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KM.6/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 145/KM.6/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KM.6/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar.
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-82/PB/2011 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga.
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-85/PB/2011 tentang Penatausahaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga.
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non-Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar.
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual pada Laporan Keuangan.
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga.

e. Tugas Pokok dan Fungsi BPK RI

Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2006 tanggal 30 Oktober 2006, Bab III Bagian Kesatu Pasal 6 tentang Tugas BPK antara lain disebutkan bahwa :

- BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
- Pelaksanaan pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan Undang-Undang tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Sedangkan sesuai Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan RI No. 39/K/I-VIII, 3/7/2007 tanggal 13 Juli 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan RI khususnya pada Bab II tentang susunan, tugas dan fungsi antara lain disebutkan bahwa pelaksana BPK dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut :

- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Inspektorat Utama;
- c. Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara;
- d. Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara;
- e. Auditorat Utama Keuangan Negara I;
- f. Auditorat Utama Keuangan Negara II;
- g. Auditorat Utama Keuangan Negara III;
- h. Auditorat Utama Keuangan Negara IV;

General (continued) 1.
Legal Basis of BPK RI (continued) d.

- Minister of Finance Decree No.53/KM.6/2012 regarding Application of State Property Depreciation of Fixed Assets in the Form of the Central Government Entities* -
- Minister of Finance Decree No.59/KM.6/2013 regarding Useful Life Table.* -
- Minister of Finance Decree No.94/KM.6/2013 regarding Module of State Property Depreciation of Fixed Assets in the Form of Central Government Entities.* -
- Minister of Finance Decree No.145/KM.6/2014 regarding Amendment to the Decree of the Minister of Finance No. 94/ KM. 6/2013 on State Property Depreciation Module Form of Fixed Assets in the Central Government Entities.* -
- Director General of Treasury Regulations No. PER-80/PB/2011 regarding Additions and Changes in Revenue Account, Shopping, and Transfer the standard Chart of Accounts.* -
- Director General of Treasury Regulations No. PER-82/PB/2011 regarding Accounting Guidelines Allowance for Doubtful Accounts at Ministry/Agency.* -
- Director General of Treasury Regulations No. PER-85/PB/2011 regarding Receivables Administration non-tax Revenues at Unit Ministry/Agenc.* -
- Director General of Treasury Regulations No. PER-42/PB/2012 regarding Additions and Changes in Non-Budget Account and Balance Sheet in the Standard Chart of Accounts.* -
- Director General of Treasury Regulations No.PER-62/PB/2009 regarding Procedures for Presentation of Information of the Accrual Revenues and Expenditures in the Financial Statements.* -
- Director General of Treasury Regulations No.PER-57/PB/2013 regarding Procedure for Preparation of Financial Statement of Ministry/Institution.* -

Duties and Function of BPK RI e.

Based on Law No. 15 Year 2006 dated October 30, 2006, Chapter III Part One Article 6 regarding Duties of BPK RI are as follows:

- BPK has the duties to audit state financial management and accountability performed by the Central and Regional Government, other State Institutions, Central Bank of Indonesia (BI), State-Owned Enterprises (BUMN), Public Service Agencies (BLU), Regional-Owned Enterprises (BUMD), and other institutions or agencies managing state financial.* -
- The audit intended in paragraph (1) is implemented under Law regarding Audit on State Financial Management and Accountability.* -

Audit by BPK includes financial audit, performance audit, and special-purpose audit. -

Based on Decree of BPK RI No. 39/K/I-VIII dated July 13, 2007 regarding Organization and Work Order of the Implementer Audit Board of the Republic of Indonesia, specifically Chapter II regarding arrangement, task and function, Implementers of BPK is specified as follows :

- Secretariat General;* a.
- Principal Inspectorate;* b.
- Principal Directorate of Planning, Evaluation, Development, Education and Training of State Financial Audit;* c.
- Principal Directorate of Mentoring and Development of Law in State Financial Audit;* d.
- Principal Auditorate of State Finance I;* e.
- Principal Auditorate of State Finance II;* f.
- Principal Auditorate of State Finance III;* g.
- Principal Auditorate of State Finance IV;* h.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 Desember 2014 dan 2013
(Disajikan dalam Rupiah)

THE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
December 31, 2014 and 2013
(Expressed in Rupiah)

1. Umum (lanjutan)

e. Tugas Pokok dan Fungsi BPK RI (lanjutan)

- i. Auditorat Utama Keuangan Negara V;
- j. Auditorat Utama Keuangan Negara VI;
- k. Auditorat Utama Keuangan Negara VII;
- l. Perwakilan BPK RI;
- m. Staf Ahli;
- n. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun tugas dan fungsi masing - masing Pelaksana BPK dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tugas Sekretariat Jenderal (Setjen) adalah menyelenggarakan dan mengkoordinasikan dukungan administrasi serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK serta Pelaksana BPK.

Sedangkan Fungsi Sekretariat Jenderal (Setjen), antara lain :

- Perumusan dan Pengevaluasian rencana aksi Setjen dengan mengidentifikasi indikator kinerja utama berdasarkan rencana implementasi rencana strategis BPK;
- Perumusan rencana kegiatan Setjen berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Setjen;
- Pemberian pertimbangan aspek - aspek pengendalian intern dalam rangka penyempurnaan sistem dan prosedur kerja.

Tugas dan fungsi Inspektorat Utama (Itama) adalah :

- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unsur Pelaksana BPK.
- Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Itama dengan mengidentifikasi indikator kinerja utama berdasarkan rencana implementasi rencana strategis BPK;
- Perumusan rencana kegiatan Itama berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Itama;
- Perumusan kebijakan pengawasan di lingkungan Pelaksana BPK.

Tugas Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksa Keuangan Negara adalah menyelenggarakan perencanaan strategis dan manajemen kinerja, evaluasi dan pelaporan pemeriksaan, penelitian dan pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan.

Sedangkan Fungsi Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksa Keuangan Negara, antara lain:

- Perumusan kebijakan di bidang perencanaan strategis dan manajemen kinerja, pengevaluasian dan pelaporan pemeriksaan, serta penelitian dan pengembangan;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan strategis dan manajemen kinerja, pengevaluasian dan pelaporan pemeriksaan, penelitian dan pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan;
- Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Ditama Revbang dengan mengidentifikasi indikator kinerja utama berdasarkan rencana implementasi rencana strategis BPK.

Tugas Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum (Ditama Binbangkum) Pemeriksaan Keuangan Negara adalah memberikan konsultasi dan bantuan hukum kepada Anggota BPK dan Pelaksana BPK, legislasi, pelayanan informasi hukum, serta tugas kepaniteraan dalam penyelesaian kerugian negara/ daerah.

General (continued) 1.
Duties and Function of BPK RI (continued) e.

- Principal Auditorate of State Finance V; i.
- Principal Auditorate of State Finance VI; j.
- Principal Auditorate of State Finance VII; k.
- Representative Office of BPK RI; l.
- Expert Staff; m.
- Functional Position Group. n.

Duties and function of each Implementer are as follows:

The duty of Secretariat General (Setjen) is to organize and coordinate the administrative and resources support for the good order of duties and function of BPK and Implementer of BPK.

Function held by Setjen, are as follows:

- Formulation and evaluation of action plan in its unit by identifying key performance indicator based on the implementation plan of BPK strategic plan;* -
- Formulation of working plan based on its action plan, duties and function;* -
- Giving a consideration on aspects of internal control in order to improve system and working procedure.* -

Duties and function held by Principle Inspectorate (Itama), are as follows:

- Supervision on implementation of duties and function of the entire BPK implementer.* -
- Formulation and evaluation of action plan in its unit by identifying key performance indicator based on the implementation plan of BPK strategic plan.* -
- Formulation of activity plan based on its action plan, duties, and function;* -
- Formulation of supervising policy on BPK implementer.* -

The duty of Principal Directorate of Planning, Evaluation, Development, Education and Training of State Financial Audit (Ditama Revbang) is to organize strategic planning and performance management, audit evaluation and reporting, research and development, education and training.

Function held by Ditama Revbang, are as follows:

- Formulation policy in strategic planning and performance management, audit evaluation and reporting, research and development.* -
- Implementation policy in strategic planning and performance management, audit evaluation and reporting, research and development, education and training.* -
- Formulation and evaluation of action plan in its unit by identifying key performance indicator based on the implementation plan of BPK strategic plan.* -

The duty of Principal Directorate of Mentoring and Development of Law in State Financial Audit (Ditama Binbangkum) is to give consultation and legal support to Board Members and Implementers, legislation, support in law information, and legal registration task in the completion of state/regional loss.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 Desember 2014 dan 2013
(Disajikan dalam Rupiah)

THE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
December 31, 2014 and 2013
(Expressed in Rupiah)

1. Umum (lanjutan)

e. Tugas Pokok dan Fungsi BPK RI (lanjutan)

Sedangkan Fungsi Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, antara lain:

- Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Ditama Binbangkum dengan mengidentifikasi indikator kinerja utama berdasarkan rencana implementasi rencana strategis BPK;
- Perumusan rencana kegiatan Ditama Binbangkum berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Ditama Binbangkum;
- Perumusan kebijakan di bidang konsultasi hukum dan kepaniteraan dalam penyelesaian kerugian negara/daerah, serta legislasi, analisis, bantuan hukum, dan pelayanan informasi hukum.

Tugas Auditorat Utama Keuangan Negara I (AKN I) adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan.

Sedangkan Fungsi Auditorat Utama Keuangan Negara I, antara lain:

- Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi AKN I dengan mengidentifikasi indikator kinerja utama berdasarkan rencana implementasi rencana strategis BPK;
- Perumusan rencana kegiatan AKN I berdasarkan rencana aksi, serta tugas dan fungsi AKN I;
- Penyusunan program, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada lingkup tugas AKN I, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh AKN I maupun yang dilimpahkan kepada Perwakilan BPK RI, yang meliputi Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.

Tugas dan Fungsi Auditorat Utama Keuangan Negara II, antara lain:

- Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada bidang perekonomian dan perencanaan pembangunan nasional.
- Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi AKN II dengan mengidentifikasi indikator kinerja utama berdasarkan rencana implementasi rencana strategis BPK;
- Perumusan dan rencana kegiatan AKN II berdasarkan rencana aksi, serta tugas dan fungsi AKN II;
- Penyusunan program, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada lingkup tugas AKN II, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh AKN II maupun yang dilimpahkan kepada Perwakilan BPK RI, yang meliputi Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.

Tugas dan Fungsi Auditorat Utama Keuangan Negara III (AKN III), antara lain:

- Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada bidang lembaga negara, kesejahteraan rakyat, kesekretariatan negara, aparatur negara, dan riset dan teknologi;
- Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi AKN III dengan mengidentifikasi indikator kinerja utama berdasarkan rencana implementasi rencana strategis BPK;
- Perumusan rencana kegiatan AKN III berdasarkan rencana aksi, serta tugas dan fungsi AKN III;
- Penyusunan program, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada lingkup tugas AKN III, baik yang pemeriksaannya dilakukan oleh AKN III maupun yang dilimpahkan kepada Perwakilan BPK RI, yang meliputi Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.

General (continued) 1.
Duties and Function of BPK RI (continued) e.

Function held by Ditama Binbangkum, are as follow:

- Formulation and evaluation of action plan in its unit by identifying key performance indicator based on the implementation plan of BPK strategic plan;* -
- Formulation of activity plan based on its action plan, duties and function;* -
- Formulation of policy in legal consultation and registration in the completing of state/ regional loss, legislation, analysis, legal support and legal information service.* -

The duty of Principle Auditorate of State Finance I (AKN I) is to audit state financial management and accountability on politic, law, defense and security.

Function held by AKN I, are as follows:

- Formulation and evaluation of action plan in its unit by identifying key performance indicator based on the implementation plan of BPK strategic plan;* -
- Formulation of activity plan based on its action plan, duties and function;* -
- Program arrangement, implementation and control of state financial management and accountability audit in its scope of duty either conducted by AKN I itself or delegated to representative office, which includes financial audit, performance audit and special-purpose audit;* -

Duties and function held by Principle Auditorate of State Finance II (AKN II), are as follows:

- State financial management and accountability audit on economic and national development planning.* -
- Formulation and evaluation action plan in its unit by identifying key performance indicator based on the implementation plan of BPK strategic plan;* -
- Formulation of activity plan based on its action plan, duties and function;* -
- Program arrangement, implementation and control of state financial management and accountability audit in its scope of duty, either conducted by AKN II itself or delegated to representative office, which includes financial audit, performance audit and special-purpose audit;* -

Duties and function held by Principle Auditorate of State Financial III (AKN III), are as follows:

- State financial management and accountability audit on state institution, people prosperity, state secretariat, state apparatus, research and technology;* -
- Formulation and evaluation of action plan in its unit by identifying key performance indicator based on the implementation plan of BPK strategic plan;* -
- Formulation of activity plan based on its action plan, duties and function;* -
- Program arrangement, implementation and control of state financial management and accountability audit in its scope of duty, either conducted by AKN III itself or delegated to representative office, which includes financial audit, performance audit, and special-purpose audit.* -

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 Desember 2014 dan 2013
(Disajikan dalam Rupiah)

THE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
December 31, 2014 and 2013
(Expressed in Rupiah)

1. Umum (lanjutan)

e. Tugas Pokok dan Fungsi BPK RI (lanjutan)

Tugas dan Fungsi Auditorat Utama Keuangan Negara IV (AKN IV), antara lain:

- Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada bidang lingkungan hidup, pengelolaan sumber daya alam, dan infrastruktur;
- Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi AKN IV dengan mengidentifikasi indikator kinerja utama berdasarkan rencana implementasi rencana strategis BPK;
- Perumusan rencana kegiatan AKN IV berdasarkan rencana aksi, serta tugas dan fungsi AKN IV;
- Penyusunan program, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah pada lingkup tugas AKN IV, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh AKN IV maupun yang dilimpahkan kepada Perwakilan BPK RI, yang meliputi Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.

Tugas dan Fungsi Auditorat Utama Keuangan Negara V (AKN V), antara lain:

- Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias (BRR NAD-Nias), dan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam, serta keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Pemerintah Daerah di wilayah Sumatera dan Jawa;
- Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi AKN V dengan mengidentifikasi indikator kinerja utama berdasarkan rencana implementasi rencana strategis BPK;
- Perumusan rencana kegiatan AKN V berdasarkan rencana aksi, serta tugas dan fungsi AKN V;
- Penyusunan program, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah pada lingkup tugas AKN V, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh AKN V maupun yang dilimpahkan kepada Perwakilan BPK RI, yang meliputi Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.

Tugas dan Fungsi Auditorat Utama Keuangan Negara VI (AKN VI), antara lain:

- Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah pada Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Kementerian Pendidikan Nasional, serta keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Pemerintah Daerah di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.
- Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi AKN VI dengan mengidentifikasi indikator kinerja utama berdasarkan rencana implementasi rencana strategis BPK.
- Perumusan rencana kegiatan AKN VI berdasarkan rencana aksi, serta tugas dan fungsi AKN VI.
- Penyusunan program, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah pada lingkup tugas AKN VI, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh AKN VI maupun yang dilimpahkan kepada Perwakilan BPK RI, yang meliputi Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.

General (continued) 1.

Duties and Function of BPK RI (continued) e.

Duties and function held by Principle Auditorate of State Finance IV (AKN IV), are as follows:

- *State financial management and accountability audit on environment, natural resources management and infrastructure.*
- *Formulation and evaluation of action plan in its unit by identifying key performance indicator based on the implementation plan of BPK strategic plan;*
- *Formulation of activity plan based on its action plan, duties and function;*
- *Program arrangement, implementation and control of state financial management and accountability audit in its scope of duty, either conducted by AKN IV itself or delegated to representative office, which includes financial audit, performance audit and special-purpose audit.*

Duties and function held by Principal Auditorates of State Finance V (AKN V), are as follows:

- *State financial management and accountability audit on Ministry of Home Affairs, Ministry of Religious Affairs, Reconstruction and Rehabilitation Agency for NAD-NIAS, Industrial Region Development Authority of Batam Island, as well as regional finance and separated regional wealth of Regional Governments in Sumatera and Java;*
- *Formulation and evaluation of action plan in its unit by identifying key performance indicator based on the implementation plan of BPK strategic plan;*
- *Formulation of activity plan based on its action plan, duties and function;*
- *Program arrangement, implementation and control of state financial management and accountability audit in its scope of duty, either conducted by AKN V itself or delegated to representative offices, which includes financial audit, performance audit and special-purpose audit.*

Duties and function held by Principle Auditorates of State Finance VI (AKN VI), are as follows:

- *State/regional financial management and accountability audit on Ministry of Health, Drug and Food Supervisory Agency, State Ministry for the Acceleration of Development in the Eastern Region of Indonesia, Ministry of National Education, as well as regional finance and separated regional wealth of Regional Governments in Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku and Papua.*
- *Formulation and evaluation of action plan in its unit by identifying key performance indicator based on the implementation plan of BPK strategic plan;*
- *Formulation of activity plan based on its action plan, duties and function;*
- *Program arrangement, implementation and control of state financial management and accountability audit in its scope of duty, either conducted by AKN VI itself or delegated to representative offices, which includes financial audit, performance audit and special-purpose audit.*

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 Desember 2014 dan 2013
(Disajikan dalam Rupiah)

THE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
December 31, 2014 and 2013
(Expressed in Rupiah)

1. Umum (lanjutan)

e. Tugas Pokok dan Fungsi BPK RI (lanjutan)

Tugas dan Fungsi Auditorat Utama Keuangan Negara VII (AKN VII), antara lain:

- Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada bidang Kekayaan Negara yang Dipisahkan (Badan Usaha Milik Negara).
- Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi AKN VII dengan mengidentifikasi indikator kinerja utama berdasarkan rencana implementasi rencana strategis BPK.
- Perumusan rencana kegiatan AKN VII berdasarkan rencana aksi, serta tugas dan fungsi AKN VII.
- Penyusunan program, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah pada lingkup tugas AKN VII, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh AKN VII maupun yang dilimpahkan kepada Perwakilan BPK RI, yang meliputi Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.

Tugas dan Fungsi Staf Ahli, antara lain:

- Memberikan kajian kepada BPK mengenai masalah tertentu sesuai dengan bidang keahliannya, yang tidak menjadi bidang tugas Sekretariat Jenderal, Inspektorat Utama, Direktorat Utama, dan Auditorat Utama Keuangan Negara.
- Memberikan kajian mengenai kebijakan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah pusat, dan memberikan masukan kepada BPK mengenai kebijakan dan strategi pemeriksaannya, serta melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan oleh BPK.

Tugas dan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional, antara lain:

- Melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Kebijakan Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan dan belanja; basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Laporan Realisasi Anggaran disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan dari KUN.

Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari KUN.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan tahun 2014 dan 2013 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan demikian, dalam penyusunan Laporan Keuangan BPK RI telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan BPK RI adalah sebagai berikut:

General (continued) 1.
Duties and Function of BPK RI (continued) e.

Duties and function held by Principle Auditorate of State Finance VII (AKN VII), are as follow:

- *State financial management and accountability audit on separated national wealth (State-Owned Enterprises).*
- *Formulation and evaluation of action plan in its unit by identifying key performance indicator based on the implementation plan of BPK strategic plan;*
- *Formulation of activity plan based on its action plan, duties and function;*
- *Program arrangement, implementation and control of state financial management and accountability audit in its scope of duty, either conducted by AKN VII itself or delegated to representative office, which includes financial audit, performance audit and special-purpose audit.*

Duties and function held by Expert Staff, among others, are:

- *Providing studies on its fields of expertise not already covered by Secretariat General, Principal Inspectorates, Principal Directorates and Principal Auditorates.*
- *Providing studies on state financial management and accountability policy, consideration on BPK's audit strategy and policy, as well as carrying out other duties given by BPK.*

Duties and function held by Functional Position Group, among others, are:

- *Carrying out activities based on each functional position, in accordance to the regulation.*

Accounting Policies 2.

The government financial statements applies cash basis accounting principle for the recognition of revenues and expenditures; accrual basis for the recognition of assets, liabilities and equity, as stated in the Government Regulation No. 24 of 2005 is amended by the Government Regulation No. 71 of 2010 regarding Government Accounting Standards.

The Statement of Budget Realization is prepared on cash basis which means a basis of accounting under which transactions and other events are recognized when cash or its equivalent is received or paid by Central Government Cash Account (KUN).

Assets, liabilities and equity in the balance sheet are recognized on accrual basis which means a basis of accounting under which the transactions and other event are recognized when they occur, and not only when cash or cash equivalent is received or paid by KUN.

The preparation and presentation of the 2014 and 2013 Financial Statements refers to the Government Accounting Standards (SAP) stipulated by Government Regulation No. 71 of 2010 regarding Government Accounting Standards. Therefore, the principles of sound financial management in governmental institutions have been applied in the preparation of the Financial Statements of BPK RI.

These are accounting policies that have been applied in the preparation of the Financial Statements of BPK RI are as follows:

2. Kebijakan Akuntansi (lanjutan)

Accounting Policies (continued) 2.

a. Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan Kas Umum Negara (KUN) yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan pembukuan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

b. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Belanja disajikan di muka (*face*) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/ jenis belanja.

c. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan /atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan /atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya.

c1. Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Aset lancar ini terdiri dari :

- Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas di bendahara pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab bendahara pengeluaran yang berasal dari sisa uang muka dari KPPN yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Negara pada tanggal neraca. Kas di bendahara pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening bendahara pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang sumbernya berasal dari uang muka dari KPPN yang belum disetor kembali ke kas negara pada tanggal neraca.
- Kas Lainnya dan Setara Kas
Kas lainnya dan setara kas mencakup kas lainnya di bendahara pengeluaran, yaitu kas yang berada dibawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari uang muka dari KPPN, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai. Selain hal tersebut, kas lainnya dan setara kas mencakup kas yang dikuasai tim pengelola PNBPN yang bertugas antara lain menerima dan menyetor PNBPN yang berasal dari kantor BPK RI Pusat yang nilainya relatif kecil, gaji/TKPK yang belum disetor, honor yang belum disetor, uang makan yang belum disetor, pajak yang belum disetor dan jasa giro yang belum disetor

Revenues a.

Revenues are all receipts of KUN which add the current equity in the related budget year period that become the right of the government and with no repayment obligation by the government. Revenues are recognized at the time the cash is received by KUN. The accounting of revenues is conducted on gross principle, the principle that does not allow an organization unit to record the receipt in net after being deducted by the disbursement or does not allow to record the disbursement after compensation between receipt and disbursement.

Revenues are presented according to the types of revenue.

Expenditures b.

Expenditures are all disbursements from KUN that reduce the current equity in the related budget year period for which repayment will not be receipt by the government. Expenditures are recognized at the time of disbursement from KUN. Specifically for disbursements through the disbursing treasurer, the recognition takes place at the time that the accountability of the mentioned disbursements is approved by the State Treasury Service Office (KPPN).

Expenditures are presented on the face of the financial statements according to the economic classifications/ types of expenditure.

Assets c.

Assets are economic resources controlled and/ owned by the government as a result of past events and from which economic and/or social benefits are expected to be obtained in the future, either by the government or by the people, and can be measured in monetary units, including non-financial resources which are needed to provide services to the public and resources that are maintained for historical and cultural reasons. The definition of assets does not apply to natural resources such as forests, marine resources and mineable minerals. Assets are recognized at the time they are received or at the time the ownership right is transferred.

Assets are classified into current assets, fixed assets, and other assets.

Current Assets c1.

An assets is classified as current assets if expected to be realized immediately, used, or held for sale within 12 (twelve) months from the reporting date.

The current assets consists of:

Cash in Disbursing Treasurer -

Cash in disbursing treasurer are cash which controlled, managed and under the responsibility of the disbursing treasurer from the rest of the treasury office (KPPN) has not been accounted for or remitted back to the State Treasury at the balance sheet date. Cash in disbursing treasurer include the entire account balance treasure, coins, paper money and other sources of cash that comes from advances from the KPPN which has not been paid back to the State Treasury at the balance sheet date.

Other Cash and Cash Equivalents -

Other cash and cash equivalents include other cash in disbursing treasurer, which is under the responsibility of the treasurer and does not come from advances from KPPN, either in bank account balances and cash balances. In addition, other cash and cash equivalents includes cash held by the Non-Tax Revenue (PNBP) team, which receive and deposit the tax revenues derived from BPK RI Office with lower value, salary/ special allowance (TKPK) that has not been paid, the fees have not been paid, meal that has not been paid, the tax has not been paid and current accounts interest that have not been paid

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 Desember 2014 dan 2013
(Disajikan dalam Rupiah)

THE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
December 31, 2014 and 2013
(Expressed in Rupiah)

2. Kebijakan Akuntansi (lanjutan)	Accounting Policies (continued) 2.
c. Aset (lanjutan)	Assets (continued) c.
c1. Aset Lancar (lanjutan)	Current Assets (continued) c1.
- Piutang Bukan Pajak Piutang bukan pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan tanggal neraca. Basis kas menuju akrual menghendaki adanya pengakuan akun-akun akrual antara lain utang dan piutang. Oleh sebab itu, Surat penagihan (SPN) dan/ atau Surat Pemindahan Penagihan Piutang Negara (SP3N) PNPB yang sampai pada tanggal neraca belum dibayar oleh wajib bayar harus dilaporkan sebagai piutang PNPB dalam neraca, termasuk didalamnya adalah:	- <i>Non-Tax Receivables</i> <i>Non-tax receivables are receivables from non-tax revenue that has not been settled up to the balance sheet date. Cash basis to the accrual requires the recognition of accrual accounts such as debt and receivables. Therefore, billing (SPN) and/ or letter of transfer of accounts receivable billing state (SP3N) non-tax revenues are up on the balance sheet date has not been paid by the tax payer should be reported as a receivable on the balance sheet, including:</i>
i. Kelebihan belanja perjalanan dinas yang telah dipertanggungjawabkan rampung jumlahnya, namun pada tanggal neraca masih belum diselesaikan oleh pelaksana perjalanan dinas. ii. Kelebihan pembayaran gaji/ TKPK kepada pegawai.	i. <i>The excess of official travel expenditures which has fully paid, but until the balance sheet date it has not been resolved by the person who implementing the official travel.</i> ii. <i>The overpayment of salary/ TKPK.</i>
- Bagian Lancar Tagihan Perbendaharaan (TP) / Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Bagian lancar TP/ TGR merupakan reklasifikasi dari piutang jangka panjang untuk tagihan TP/ TGR yang jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.	- <i>Current Portion of Indemnification Claims (TP/TGR)</i> <i>Current portion of indemnification claims (TP/TGR) is a reclassification of long-term receivables of TP/TGR which due in 12 (twelve) months after the balance sheet date.</i>
- Persediaan Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan dicatat di neraca berdasarkan: i. harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian; ii. harga standar, apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; dan iii. harga wajar atau estimasi nilai penjualannya, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/ rampasan.	- <i>Inventories</i> <i>Inventories are current assets in the form of goods or equipment in good condition is intended to support the operational activities of the government, and the goods were intended to be submitted in the context of service to the community.</i> <i>Inventories are recorded in the balance sheet:</i> i. <i>final purchase price, if acquired by purchase;</i> ii. <i>standard price if obtained by producing its own;</i> iii. <i>fair value or estimated sales value if obtained by others means such as donation/ spoils.</i>
Sesuai dengan SAP, pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik dan bilamana persediaan dalam kondisi rusak maka cukup diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.	<i>In accordance with SAP, at the end of the accounting period, inventories are recorded based on the results of physical inventory checking (stock opname) and inventory in damage condition, are sufficiently disclosed in the notes to financial statements.</i>
- Belanja Dibayar di Muka Belanja dibayar di muka berasal dari realisasi belanja tahun pelaporan, namun barang/ jasa/ fasilitas dari pihak ketiga belum seluruhnya diterima/ dinikmati oleh satuan kerja.	- <i>Prepaid</i> <i>Prepaid derived from spending of the reporting year, but the goods/ services/ facilities has not been fully accepted/ enjoyed by the working unit.</i>
c2. Aset Tetap	Fixed Assets c2.
Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada neraca pada tanggal 31 Desember 2014 berdasarkan harga perolehan. Pengecualian untuk aset tetap pada neraca awal (perolehan sampai dengan 31 Desember 2004) dilaporkan di neraca pada tanggal 31 Desember 2008 berdasarkan hasil revaluasi dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).	<i>Fixed assets include all assets used by the government or for public interest that have useful life of more than one year. Fixed assets are presented on the balance sheets as of December 31, 2014 at the acquisition price. Unless for fixed assets at beginning balance sheet (price until December 31, 2004) presented at balance sheet period of December 31, 2008 based on revaluation value from DJKN.</i>
Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.05/2007, nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap, yaitu:	<i>In accordance with the Regulation of the Minister of Finance Number 120/PMK.05/2007, the unit value of the minimum capitalization of fixed assets, are as follow:</i>
- Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);	- <i>Expenditures for each unit of equipment and machineries and sport equipment the amount of which is equal to or more than Rp300,000 (three hundred thousand rupiah);</i>

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 Desember 2014 dan 2013
(Disajikan dalam Rupiah)

THE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
December 31, 2014 and 2013
(Expressed in Rupiah)

2. Kebijakan Akuntansi (lanjutan)	Accounting Policies (continued) 2.
c. Aset (lanjutan)	Assets (continued) c.
- Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah); dan - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/ irigasi/ jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.	- <i>Expenditures for building and properties the amount of which is equal to or more than Rp10,000,000 (ten million rupiah); and</i> - <i>Expenditures beyond the minimum limit of capitalization value were treated as expense, except expenditures for land, road/ irrigation/transportation networks and other fixed assets in the form of library collection and artistic items.</i>
Mengenai kapitalisasi peralatan dan mesin ditetapkan kembali dalam PMK 171/PMK.05/2007, dengan uraian sebagai berikut: Pengukuran peralatan dan mesin harus memperhatikan kebijakan pemerintah tentang pedoman kapitalisasi dan penilaian BMN. Peralatan dan Mesin yang diperoleh sebelum 1 Januari 2002, yang diperoleh sejak 1 Januari 2002 dengan nilai satuan minimum lebih dari atau sama dengan Rp300.000 serta yang diperoleh dari pengalihan, dikapitalisasi sebagai aset tetap. Peralatan dan mesin dengan kategori ini dibukukan dan dilaporkan di dalam daftar BMN dan laporan BMN intrakomptabel. Peralatan dan mesin yang diperoleh sejak 1 Januari 2002 tetapi nilai satuannya kurang dari Rp300.000 tidak dikapitalisasi. Peralatan dan mesin dengan kategori ini dibukukan di dalam daftar BMN dan laporan BMN Ekstrakomptabel.	<i>The capitalization of equipment and machinery are set back in the PMK 171/PMK.05/2007, with descriptions as follows: Measurement of equipment and machinery should pay attention to government policies regarding the guidelines for capitalization and valuation of BMN. Equipment and machinery acquired before January 1, 2002, obtained since January 1, 2002 with a minimum unit value greater than or equal to Rp300,000 and obtained from the transfer, are capitalized as fixed assets. Equipment and machinery with this category accounted for and reported in the list and reports BMN intrakomptabel. Equipment and machinery acquired since January 1, 2002 but the unit value of less than Rp300,000 are not capitalized. Equipment and machinery with this category accounted for in the list and report BMN ekstrakomptabel.</i>
c3. Piutang Jangka Panjang	Long-term Receivables c3.
Piutang jangka panjang adalah piutang pemerintah yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Piutang jangka panjang di BPK RI hanya berasal dari tagihan Tuntutan Perbendaharaan (TP)/ Tuntutan Ganti Rugi (TGR). - TP dikenakan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian negara/ daerah. TP dikenakan oleh BPK RI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. - TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung atau pun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atas kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.	<i>Long-term receivables are the government receivables maturing more than 12 months from the reporting date. Long-term receivables in BPK RI only derived from indemnification claims (TP/TGR).</i> - <i>TP subject to the treasurer for negligent or unlawful act resulting in loss country/ regions. TP imposed by BPK RI in accordance with the provisions of the legislations.</i> - <i>TGR is a process that is done to public servants not the treasurer in order to demand reimbursement of the losses suffered by the state as a direct or indirect result of an unlawful act committed by the employee for negligence in the performance of its duties.</i>
c4. Aset Lainnya	Other Assets c4.
Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset lain-lain. - Aset tak berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya. Aset tak berwujud meliputi <i>software</i>, lisensi serta aset tak berwujud lainnya. - Aset lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam aset tak berwujud. Termasuk dalam akun aset lain-lain adalah aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan.	<i>Other assets is an assets besides current assets, fixed assets and long-term receivables. Included in other assets are intangible assets and other assets.</i> - <i>Intangible assets are assets that can be identified and has no physical form and held for use in producing goods or services or used for other purposes. Intangible assets include software, licenses and other intangible assets.</i> - <i>Other assets are assets that can not be categorized as intangible assets. Included in the other assets is fixed assets which are not used in the operations of government.</i>

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 Desember 2014 dan 2013
(Disajikan dalam Rupiah)

THE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
December 31, 2014 and 2013
(Expressed in Rupiah)

2. Kebijakan Akuntansi (lanjutan)

Accounting Policies (continued) 2.

d. Kewajiban

Liabilities d.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Liabilities is a debt obligation that arises from past events whose settlement resulting outflows of economic resources of the government.

Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

In the context of the government, obligation arise partly because of the use of loan financing from the public, financial institutions, other government entities, and international agencies. Government liabilities also occur due to engagement with employees who work for the government. Any liability can be imposed by law as a consequences of a binding contract or law and regulation.

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Government liabilities are classified into short-term liabilities and long-term liabilities

- Kewajiban Jangka Pendek

Short-term Liabilities -

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

The liabilities are classified as short term liabilities if they are expected to be settled or due within a period of twelve months after the reporting date.

Kewajiban jangka pendek terdiri dari:

Short-term liabilities consist of:

1) Utang kepada Pihak Ketiga

Account Payable - Third Parties 1)

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Kewajiban ini timbul akibat hak atas barang/ jasa telah diterima dan dinikmati dan/ atau perjanjian komitmen telah dilakukan oleh kementerian negara/ lembaga/ pemerintah, namun sampai akhir periode pelaporan belum dilakukan pembayaran/ pelunasan/ realisasi atas hak/ perjanjian/ komitmen tersebut.

Third party liabilities are accrued expenses consisted of Employee Expenditures, Goods Expenditures, and Capital Expenditures. These obligations arise from the right over the goods/ services were received and enjoyed, and/ or treaty commitments have been made by national ministries/ agencies/ governments, but until the end of the reporting period have not done the payment/ settlement/ realization of right/ agreements/ commitments.

2) Pendapatan Diterima di Muka

Unearned Revenues 2)

Pendapatan diterima di muka timbul pada saat Pemerintah telah menerima pembayaran atas suatu pemberian jasa/ fasilitas/ pelayanan yang diberikan, tetapi belum menyelesaikan pekerjaan tersebut.

Unearned income arising from the government has received payment for the provision of services/ facilities/ services provided, but has not completed the job.

3) Uang Muka dari KPPN

Advance Payment from KPPN 3)

Akun Uang Muka dari KPPN merupakan jumlah kas di Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang digunakan untuk membayar belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.

Advances Payment from KPPN represents the amount of cash from the Disbursing Treasurer from Money Supply (UP) and Extra Money Supply (TUP) used to pay personnel expenditures, goods expenditures, and capital expenditures.

4) Pendapatan yang Ditangguhkan

Deferred Revenues 4)

Pendapatan yang ditangguhkan merupakan kontra akun kas lainnya dan setara kas yang berasal dari bunga/ jasa giro rekening bendahara pengeluaran, pengembalian belanja, gaji pegawai yang ditahan oleh bendahara menunggu tindak lanjut atas penetapan yang sudah diterbitkan oleh Sekjen BPK, pendapatan pajak dan PNPB yang belum disetor sampai dengan tanggal neraca.

Deferred revenues are contra accounts of other cash and cash equivalents which derived from interest income accounts, returns of expenditures, salary employees are retained by the Treasurer waiting for the follow up of the establishment that has been issued by the Secretary General of the BPK RI, income tax and non-tax revenues that have not been paid up to balance sheet date.

- Kewajiban Jangka Panjang

Long-term Liabilities -

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

The liabilities are classified as long-term liabilities if they are expected to be settled or due within a period of more than twelve months after the reporting date.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut. Sampai dengan saat ini, BPK RI tidak memiliki kewajiban jangka panjang.

Liabilities are recorded in the amount of nominal value, namely the amount of the government liabilities at the first transaction. The economic flow afterwards such as payment transaction, change of value due to a change in foreign exchange, and other changes, except the changes in market value, are calculated by adjusting the recorded value of the liability. Up to now, BPK RI does not have long-term liabilities.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 Desember 2014 dan 2013
(Disajikan dalam Rupiah)

THE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
December 31, 2014 and 2013
(Expressed in Rupiah)

2. Kebijakan Akuntansi (lanjutan)

Accounting Policies (continued) 2.

e. Ekuitas Dana

Equity e.

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan hutang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan menjadi ekuitas dana lancar dan ekuitas dana investasi. Ekuitas dana lancar merupakan selisih antara aset lancar dengan utang jangka pendek. Ekuitas dana investasi mencerminkan aset tetap, piutang jangka panjang dan aset lainnya.

Equity is the net government assets that constitute the difference between government assets and liabilities. Equity is classified into current equity and investment equity. Current equity is the difference between current assets and short-terms liabilities. Investment equity reflects the fixed assets, long-term receivables and other assets.

3. Anggaran dan Realisasi Pendapatan

Budget and Realization of Revenues 3.

Perbandingan realisasi pendapatan yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Hibah antara tahun 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

The comparison of the realization and the budget of revenues from Non-Tax Revenues (PNBP) between 2014 and 2013 is as follows:

2014			2013		
Anggaran/ Budget	Realisasi/ Realization	%	Anggaran/ Budget	Realisasi/ Realization	%
1.161.900.000	24.503.525.195	2.108,92	1.014.093.000	21.409.853.927	2.111,23
1.161.900.000	24.503.525.195	2.108,92	1.014.093.000	21.409.853.927	2.111,23

Pendapatan merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). PNBP juga memberikan kontribusi bagi pendapatan negara. Realisasi PNBP pada tahun 2014 sebesar Rp24.503.525.195 atau 2.108,92% dari anggarannya sebesar Rp1.161.900.000.

Revenues represent Non-Tax Revenues (PNBP). PNBP also contribute to the state revenues. Realization of PNBP in 2014 amounted Rp24,503,525,195 or 2,108.92% of the budget amounted Rp1,161,900,000.

Capaian PNBP sebesar Rp24.503.525.195 dari yang ditargetkan, terjadi karena adanya kenaikan yang signifikan untuk beberapa PNBP, dengan rincian sebagai berikut:

The realization of Non-Tax Revenues (PNBP) amounted Rp24,503,525,195 exceeding the target was due to significant increase in several PNBP, with following details:

MAP/ Budget Code	Uraian/ Descriptions	2014			
		Anggaran/ Budget	Realisasi/ Realization	Selisih/ Difference	%
42311	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi/Sitaan Revenues from the Sale of Production/ Confiscated Goods	-	1.102.260	1.102.260	-
42312	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Revenues from the Sale of Assets	-	767.645.000	767.645.000	-
42314	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Revenues from Lease of BMN	-	1.790.839.397	1.790.839.397	-
42321	Pendapatan Jasa I/ Revenues from Services I	1.161.900.000	4.123.480.000	2.961.580.000	354,89
42322	Pendapatan Jasa II/ Revenues from Services II	-	1.136.264	1.136.264	-
42375	Pendapatan Denda/ Penalty Revenues	-	673.771.333	673.771.333	-
42391	Pendapatan dari Penerimaan Kembali TAYL/ Revenues from Last Fiscal Year Income	-	12.455.758.973	12.455.758.973	-
42392	Pendapatan Pelunasan Piutang/ Payment of Receivables	-	126.000.000	126.000.000	-
42399	Pendapatan Lain-lain/ Other Revenues	-	4.563.791.968	4.563.791.968	-
	Jumlah/ Total	1.161.900.000	24.503.525.195	23.341.625.195	2.108,92

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 Desember 2014 dan 2013
(Disajikan dalam Rupiah)

THE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
December 31, 2014 and 2013
(Expressed in Rupiah)

3. Anggaran dan Realisasi Pendapatan (lanjutan)

Budget and Realization of Revenues (continued) 3.

a. Pendapatan Penjualan Hasil Produksi/ Sitaan (MAP 42311)

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2014, BPK RI tidak mengestimasi PNPB yang berasal dari penjualan hasil produksi/ sitaan (MAP 42311). Adapun realisasi pendapatan penjualan hasil produksi/ sitaan (MAP 42311) tahun 2014 adalah sebesar Rp1.102.260. Realisasi tersebut turun sebesar Rp1.411.740 atau 56,16% di bandingkan realisasi tahun 2013 sebesar Rp2.514.000.

Sale of Production/ Confiscated Goods (MAP 42311)

According to DIPA for 2014, BPK RI did not estimated the non-tax revenues from sales of production/ confiscated goods (MAP 42311). The realization of Sale of production/ confiscated goods (MAP 42311) in 2014 amounted Rp1,102,260. It was decreased by Rp1,411,740 or 56.16% compared to the realization in 2013 amounted to Rp2,514,000.

b. Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN (MAP 42312)

Berdasarkan DIPA tahun 2014, BPK RI tidak mengestimasi PNPB yang berasal dari pendapatan pemindahtanganan BMN. Adapun realisasi pendapatan dari pemindahtanganan BMN (MAP 42312) sebesar Rp767.645.000. Realisasi tersebut naik sebesar Rp291.028.293 atau sebesar 61,06% dari realisasi tahun 2013 yang sebesar Rp476.616.707.

Revenues from the Sale of Assets (MAP 42312)

According to DIPA for 2014, BPK RI did not estimated the non-tax revenues from the sale of assets. The realization of revenues from the sale of asset (MAP 42312) amounted Rp767,645,000. The realization was increased by Rp291,028,293 or 61.06% compared to the realization in 2013 amounted to Rp476,616,707.

c. Pendapatan dari Pemanfaatan BMN (MAP 42314)

Berdasarkan DIPA tahun 2014, BPK RI tidak mengestimasi PNPB yang berasal dari pendapatan pemanfaatan BMN (MAP 42314). Adapun realisasi pendapatan dari pemanfaatan BMN tahun 2014 adalah sebesar Rp1.790.839.397. Realisasi tersebut naik sebesar Rp1.243.107.154 atau 226,96% di bandingkan realisasi tahun 2013 sebesar Rp547.732.243.

Revenues from Lease (MAP 42314)

According to DIPA for 2014, BPK RI did not estimated the non-tax revenues from lease revenues (MAP 42314). The realization of lease revenues in 2014 amounted Rp1,790,839,397. The realization was increase by Rp1,243,107,154 or 226.96% compared to the realization in 2013 amounted to Rp547,732,243.

d. Pendapatan Jasa I (MAP 42321)

Berdasarkan DIPA tahun 2014, BPK RI mengestimasi PNPB yang berasal dari pendapatan jasa I (MAP 42321) sebesar Rp1.161.900.000. Adapun realisasi pendapatan jasa I tahun 2014 adalah sebesar Rp4.123.480.000. Realisasi tersebut naik sebesar Rp2.151.114.925 atau 109% di bandingkan realisasi tahun 2013 sebesar Rp1.972.365.075.

Revenues from Services I (MAP 42321)

According to DIPA for 2014, BPK RI has estimated the non-tax revenues from services I (MAP 42321) amounted to Rp1.161.900.000. The realization of Revenue Services I in 2014 is Rp. 4.123.480.000. The realization were increased by Rp. 2.151.114.925 or 109% compared to the realization in 2013 of Rp. 1.972.365.075.

e. Pendapatan Jasa II (MAP 42322)

Berdasarkan DIPA tahun 2014, BPK RI tidak mengestimasi PNPB yang berasal dari pendapatan jasa II (MAP 42322). Adapun realisasi pendapatan jasa II tahun 2014 adalah sebesar Rp1.136.264. Realisasi tersebut turun sebesar Rp640.187 atau 36,04% di bandingkan realisasi tahun 2013 sebesar Rp1.776.451.

Revenues from Services II (MAP 42322)

According to DIPA for 2014, BPK RI did not estimate the non-tax revenues derived from the Revenue Services II (MAP 42322) amounted Rp1.136.264. The realization of Revenue Services II in 2014 is Rp.1.136.264,00. The realization were decreased by Rp. 640.187 or 36,04% compared to the realization in 2013 of Rp. 1.776.451.

f. Pendapatan Denda (MAP 42375)

Berdasarkan DIPA tahun 2014, BPK RI tidak mengestimasi adanya PNPB yang berasal dari pendapatan denda (MAP 42375). Adapun realisasi pendapatan denda (MAP 42375) tahun 2014 adalah sebesar Rp673.771.333. Realisasi tersebut turun sebesar Rp383.148.948 atau 36,25% di bandingkan realisasi tahun 2013 sebesar Rp1.056.920.281.

Penalty Revenues I (MAP 42375)

According to DIPA for 2014, BPK RI did not estimate the non-tax revenues derived from the Revenue Fines I (MAP 42375). The realization of Revenue Fines I (MAP 42375) in 2014 amounted Rp. 673.771.333,00. Realization were decreased by Rp. 383.148.948 or 36,25% compared to the realization in 2013 of Rp. 1.056.920.281.

g. Pendapatan dari Penerimaan Kembali TAYL (MAP 42391)

Berdasarkan DIPA tahun 2014, BPK RI tidak mengestimasi adanya PNPB yang berasal dari penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu (TAYL) (MAP 42391). Adapun realisasi penerimaan kembali TAYL Tahun 2014 adalah sebesar Rp12.455.758.973. Realisasi tersebut turun sebesar Rp4.638.173.631 atau 27,13% di bandingkan realisasi tahun 2013 sebesar Rp17.093.932.604.

Received of last fiscal year revenue (MAP 42391)

According to DIPA for 2014, BPK RI has estimate the non-tax revenues derived from receipts from Last Fiscal Year (TAYL) (MAP 42391). The realization of revenue receipts from last fiscal year 2014 amounted Rp. 12.455.758.973 . The realization were decreased by Rp. 4.638.173.631 or 17,13% compared to the realization in 2013 of Rp. 17.093.932.604.

h. Pendapatan Pelunasan Piutang (MAP 42392)

Berdasarkan DIPA tahun 2014, BPK RI tidak mengestimasi adanya PNPB yang berasal dari pelunasan piutang (MAP 42392). Adapun realisasi pendapatan pelunasan piutang tahun 2014 adalah sebesar Rp126.000.000. Realisasi tersebut turun sebesar Rp3.290.000 atau 2,54% di bandingkan realisasi tahun 2013 sebesar Rp129.290.000.

Payment of Receivable (MAP 42392)

According to DIPA for 2014, BPK RI did not estimate the non-tax revenues derived from the settlement of receivables (MAP 42392). The realization of the Revenue Settlement of accounts receivable in 2014 amounted Rp. 126.000.000 . The realization were decreased by Rp. 3.290.000 or 2,54% compared to the realization in 2013 of Rp. 129.290.000.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2014 DAN 2013

THE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014 AND 2013

3. Anggaran dan Realisasi Pendapatan (lanjutan)

Budget and Realization of Revenues (continued) 3.

i. Pendapatan Lain-lain (MAP 42399)

Other Revenues (MAP 42399) j.

Berdasarkan DIPA tahun 2014, BPK RI tidak mengestimasi adanya PNBPN yang berasal dari pendapatan lain-lain (MAP 42399). Adapun realisasi pendapatan lain-lain (MAP 42399) tahun 2014 adalah sebesar Rp4.563.791.968. Realisasi tersebut naik sebesar Rp4.435.085.402 atau 3.445,89% di bandingkan realisasi tahun 2013 sebesar Rp128.706.566.

Based on the DIPA In 2014, BPK RI did not estimate the non-tax revenues from Other Income (MAP 42399). The realization of Other Income (MAP 42399) in 2014 was Rp. 4.563.791.968. The realization were increase by Rp. 4.435.085.402 or 3.445,89% compared to the realization in 2013 of Rp. 128.706.566.

4. Anggaran dan Realisasi Belanja

Budget and Realization of Expenditures 4.

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Kementerian Negara/ Lembaga. Belanja BPK RI meliputi belanja pegawai, barang dan modal. Perbandingan realisasi belanja antara tahun 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

Expenditures are made by taking into account the principles of economy and efficiency, but still guarantee the implementation of activities as stipulated in the State Ministry/ Institution Work Plan. The expenditures of BPK RI include personnel expenditures, operating and capital expenditures. The comparison of the expenditure realization in 2014 and 2013 is as follows:

2014			2013		
Anggaran/ Budget	Realisasi/ Realization	%	Anggaran/ Budget	Realisasi/ Realization	%
2.596.280.038.000	2.306.531.652.946	88,84	2.831.594.415.000	2.385.865.184.498	84,26

Perbandingan realisasi belanja antara tahun 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

The comparison of the expenditure realization by type of expenditures in 2014 and 2013 is as follows:

Kode Jenis Belanja/ Expenditures Type Code	Uraian Jenis Belanja/ Description of Expenditures Type	2014	2013	Kenaikan (Penurunan)/ Increase (Decrease)
51	Belanja Pegawai/ Employee Expenditures	817.812.034.666	729.682.923.966	88.129.110.700
52	Belanja Barang/ Goods Expenditures	1.180.569.700.096	1.166.170.840.337	14.398.859.759
53	Belanja Modal/ Capital Expenditures	308.149.918.184	490.011.420.195	(181.861.502.011)
	Jumlah/ Total	2.306.531.652.946	2.385.865.184.498	(79.333.531.552)

Rincian belanja modal adalah sebagai berikut:

Details of the capital expenditures are as follows:

		31 Desember/ December 31,			
		2014	2013		
1.	Tanah	31.105.300.000	123.338.365.700	Land	1.
2.	Peralatan dan Mesin	130.505.219.524	159.806.652.600	Equipment and Machinery	2.
3.	Gedung dan Bangunan	133.327.415.893	179.664.540.320	Building and Property	3.
4.	Fisik Lainnya	13.211.982.767	27.201.861.575	Other Fixed Assets	4.
	Jumlah	308.149.918.184	490.011.420.195	Total	

Perbandingan antara anggaran dengan realisasi belanja berdasarkan sumber pendanaan untuk tahun 2014 adalah sebagai berikut:

The comparison of the realization of expenditures based on the sources of fund in 2014 is as follows:

No.	Uraian Jenis Belanja/ Description of Expenditure Type	Anggaran/ Budget	Realisasi/ Realization	Sisa Anggaran/ Rest of the Budget
1	Rupiah Murni/ Domestic			
	-Kas	2.594.951.954.000	2.297.491.156.486	297.460.797.514
	- Non Kas	-	8.563.964.460	(8.563.964.460)
2	PNBP/ Non-Tax State Revenues	-	-	-
3	Hibah/ Grant Revenues	1.328.084.000	476.532.000	851.552.000
	Jumlah/ Total	2.596.280.038.000	2.306.531.652.946	289.748.385.054

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2014 DAN 2013

THE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014 AND 2013

5. Kas di Bendahara Pengeluaran

Cash in Disbursing Treasurers 5.

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	31 Desember/ December 31,	
	2014	2013
Sekretariat Jenderal	10.524.514.841	6.459.120.316
BPK Pusat	10.332.719.035	27.800.500.588
Pusdiklat BPK RI		12.100
Perwakilan Provinsi Sumatera Barat	731.663.991	32.082.925
Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan	412.303.307	-
Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara	400.000.000	-
Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah	5.546.257	-
Perwakilan Provinsi Gorontalo	574.590.608	-
Perwakilan Provinsi Maluku		79.846.712
Perwakilan Provinsi Maluku Utara	191.571.869	-
Perwakilan Provinsi Papua	11.606.699	-
Jumlah	23.184.516.607	34.371.562.641

Secretariat General
 BPK Headquarters
 Educating and Training Center
 Representative Office in West Sumatera
 Representative Office in South Sumatera
 Representative Office in North Sulawesi
 Representative Office in middle Sulawesi
 Representative Office in Gorontalo
 Representative Office in Maluku
 Representative Office in North Maluku
 Representative Office in Papua
Total

Kas di bendahara pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan (UP) yang belum dipertanggung jawabkan atau diserahkan kembali ke kas negara.

Cash in disbursing treasurer represent cash that managed and under the responsibility of disbursing treasurer that come from residual of UP which was not reported and approved yet to KPPN.

6. Kas Lainnya dan Setara Kas

Other Cash and Cash Equivalent 6.

Saldo kas lainnya dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebesar Rp6.389.229.629 dan Rp4.656.860.249.

Other cash and cash equivalent as of December 31, 2014 and 2013 amounting to Rp6.389.229.629 and Rp4.656.860.249, respectively.

Akun ini menampung kas selain uang muka dari KPPN yang dikelola oleh bendahara pengeluaran. Dari saldo sebesar Rp6.389.229.629 tersebut di atas, senilai Rp4.227.926.869 merupakan pendapatan negara yang belum disetor ke Kas Negara yang dibukukan ke Pendapatan Yang Ditangguhkan, sedangkan sisanya senilai Rp2.161.302.760 merupakan realisasi belanja yang belum dibavarkan kepihak ketiga.

This account accommodate cash besides advances from KPPN that managed by the Disbursing Treasurer. From the balance of Rp 6.389.229.629 above, amounted to Rp4.227.926.869 represents state income that have not been paid to the State Treasury, which were recorded to Deferred Revenue, while the remaining amount Rp2.161.302.760 is a realization of expenditure have not been paid to a third parties.

7. Piutang Bukan Pajak

Non Tax Receivables 7.

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	31 Desember/ December 31,	
	2014	2013
Piutang Bukan Pajak	1.347.199.266	6.131.262.182
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(6.735.996)	(30.656.314)
Jumlah	1.340.463.270	6.100.605.868

Non-Tax Receivables
 Allowance for Doubtful Accounts
Non-Tax Receivables - Net

Piutang bukan pajak merupakan piutang atas garansi bank, sewa tanah dan rumah dinas serta kelebihan belanja pegawai.

Non-tax receivables represents receivables of a bank guarantee, lease land and home offices as well as excess personnel expenditure.

8. Bagian Lancar TP/ TGR

Current Balance of TP/TGR 8.

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	31 Desember/ December 31,	
	2014	2013
Bagian Lancar Tagihan TGR	52.046.296	53.046.296
Penyisihan Tagihan TGR	(2.829.630)	(2.834.630)
Jumlah	49.216.666	50.211.666

Indemnification Claims
 Allowance for Indemnification Claims
Total

Saldo tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 seluruhnya berasal dari Sekretariat Jenderal.

Balance of indemnification claims (TGR) on December 31, 2014 and 2013 entirely from the Secretariat-General.

Saldo bagian lancar TP/TGR tersebut di atas berasal dari piutang TGR pada Satuan Kerja Sekretariat Jenderal karena wanprestasi wajib kerja.

The current portion of TP/ TGR mentioned above comes from the accounts receivable of TGR at the Secretariat General for breach of compulsory labor.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2014 DAN 2013

THE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014 AND 2013

9. Persediaan

Inventories 9.

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	31 Desember/ December 31,	
	2014	2013
Barang Konsumsi	12.274.743.956	14.556.843.509
Bahan untuk Pemeliharaan	794.701.754	1.378.972.959
Suku Cadang	239.661.366	482.414.342
Pita Cukai, Materai, dan Leges	4.597.000	6.747.700
Barang Persediaan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat	616.962.165	472.795.125
Bahan Baku	270.196.390	416.867.071
Persediaan untuk Tujuan Strategis	12.700.000	15.000.000
Persediaan Lainnya	1.816.842.577	1.821.274.438
Jumlah	16.030.405.208	19.150.915.144

Consumer Goods
Material for Maintenance
Spare Parts
Stamps
Other Fixed assets for public

Raw Materials
Other Supplies for strategic objection
Other Supplies
Total

Persediaan barang konsumsi merupakan persediaan untuk keperluan operasional seperti alat tulis kantor, kertas, cover, bahan cetak, persediaan penunjang komputer, perabot kantor dan suku cadang kendaraan.

Consumer goods inventories are inventories of medicines, and supplies for operational needs such as office supplies, paper, cover, printed materials, computer supporting supplies, office furniture, and vehicle spare parts.

10. Belanja Dibayar Dimuka

Inventories 10.

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	31 Desember/ December 31,	
	2014	2013
Sekretariat Jenderal	194.873.310	603.438.027
Perwakilan Provinsi Aceh	21.688.121	6.493.315
Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat	1.374.158	1.153.431
Jumlah	217.935.589	611.084.773

Secretariat General
Representative Office in Aceh
Representative Office in West Borneo
Total

11. Aset Tetap

Fixed Assets 11.

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	31 Desember/ December 31, 2014			
	Saldo Awal/ Beginning Balances	Penambahan/ Reklasifikasi/ Additions/ Reclassifications	Pengurangan/ Reklasifikasi/ Deductions/ Reclassifications	Saldo Akhir/ Ending Balances
<u>Harga perolehan</u>				
Tanah	1.587.450.938.448	244.564.446.814	208.715.584.200	1.623.299.801.062
Peralatan dan Mesin	1.254.750.905.809	202.693.373.352	75.465.677.802	1.381.978.601.359
Gedung dan Bangunan	1.832.863.279.400	281.686.433.521	122.109.365.558	1.992.440.347.363
Jalan, Irigasi dan Jaringan	276.086.520.755	15.366.258.806	5.496.257.089	285.956.522.472
Aset Tetap Lainnya	55.379.615.223	102.310.867.388	107.048.780.541	50.641.702.070
	5.006.531.259.635	846.621.379.881	518.835.665.190	5.334.316.974.326
Konstruksi Dalam Pengerjaan	51.445.951.151	115.364.738.149	157.814.468.415	8.996.220.885
Jumlah harga perolehan	5.057.977.210.786	961.986.118.030	676.650.133.605	5.343.313.195.211
<u>Akumulasi Penyusutan</u>				
Peralatan dan Mesin	744.613.658.586	202.867.555.622	5.434.394.474	942.046.819.734
Gedung dan Bangunan	241.649.312.884	33.866.073.534	113.080.332.109	162.435.054.309
Jalan, Irigasi dan Jaringan	97.649.180.141	35.031.644.750	217.509.088	132.463.315.803
Aset Tetap Lainnya	217.023.968	43.209.875	-	260.233.843
Jumlah akumulasi penyusutan	1.084.129.175.579	271.808.483.781	118.732.235.671	1.237.205.423.689
Jumlah Nilai Tercatat	3.973.848.035.207			4.106.107.771.522

At cost
Land
Equipment and Machinery
Buildings and Properties
Road, Irrigation and Transmission Network
Other Fixed Assets
Construction in Progress

Total
Accumulated Depreciation
Equipment and Machinery
Buildings and Properties
Road, Irrigation and Transmission Network
Other Fixed Assets
Total accumulated depreciation
Total Carrying Amount

	31 Desember/ December 31, 2013			
	Saldo Awal/ Beginning Balances	Penambahan/ Reklasifikasi/ Additions/ Reclassifications	Pengurangan/ Reklasifikasi/ Deductions/ Reclassifications	Saldo Akhir/ Ending Balances
<u>Harga perolehan</u>				
Tanah	1.470.696.300.781	167.407.342.201	50.652.704.534	1.587.450.938.448
Peralatan dan Mesin	1.121.296.356.157	283.475.713.822	150.021.164.170	1.254.750.905.809
Gedung dan Bangunan	1.693.294.560.279	430.441.952.511	290.873.233.390	1.832.863.279.400
Jalan, Irigasi dan Jaringan	271.686.389.709	21.421.103.978	17.020.972.932	276.086.520.755
Aset Tetap Lainnya	45.716.567.413	115.167.790.257	105.504.742.447	55.379.615.223
	4.602.690.174.339	1.017.913.902.769	614.072.817.473	5.006.531.259.635
Konstruksi Dalam Pengerjaan	21.761.774.500	158.568.282.500	128.884.105.849	51.445.951.151
Jumlah harga perolehan	4.624.451.948.839	1.176.482.185.269	742.956.923.322	5.057.977.210.786

At cost
Land
Equipment and Machinery
Buildings and Properties
Road, Irrigation and Transmission Network
Other Fixed Assets
Construction in Progress
Total

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2014 DAN 2013

THE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014 AND 2013

11. Aset Tetap (lanjutan)

Fixed Assets (continued) 11.

	31 Desember/ December 31, 2013				
	Saldo Awal/ Beginning Balances	Penambahan/ Reklasifikasi/ Additions/ Reclassifications	Pengurangan/ Reklasifikasi/ Deductions/ Reclassifications	Saldo Akhir/ Ending Balances	
Akumulasi Penyusutan					Accumulated Depreciation
Peralatan dan Mesin	-	744.613.658.586	-	744.613.658.586	Equipment and Machinery
Gedung dan Bangunan	-	241.649.312.884	-	241.649.312.884	Buildings and Properties
Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	97.649.180.141	-	97.649.180.141	Road, Irrigation and Transmission Network
Aset Tetap Lainnya	-	217.023.968	-	217.023.968	Other Fixed Assets
Jumlah akumulasi penyusutan	-	1.084.129.175.579	-	1.084.129.175.579	Total accumulated depreciation
Jumlah Nilai Tercatat	4.624.451.948.839			3.973.848.035.207	Total Carrying Amount

Sesuai dengan PMK Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Perubahan atas PMK Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat dan KMK Nomor 145/KM.6/2014 tentang Perubahan atas KMK Nomor 94/KM.6/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat, maka kebijakan akuntansi aset tetap yang diperoleh sebelum tahun 2005 berubah, dari yang semula dilakukan penyusutan sejak tanggal perolehan menjadi dilakukan sejak semester II tahun 2010.

In accordance with PMK No. 90 / PMK.06 / 2014 regarding Amendment of PMK No. 1 / PMK.06 / 2013 regarding Depreciation of State-owned Assets in the form of Fixed Assets in Central Government Entity and KMK No. 145 / KM.6 / 2014 regarding Amendment of KMK No. 94 / KM.6 / 2013 regarding Modul of State-owned Assets Depreciation in the form of Fixed Assets in Central Government Entity, the accounting policies of fixed assets acquired before 2005 changed from that previously performed the depreciation since the acquisition date become performed since the second semester of 2010.

12. Piutang Jangka Panjang

Other Assets 12.

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	31 Desember/ December 31,		
	2014	2013	
Tagihan TGR	2.316.696.744	2.270.337.544	Indemnification Claims
Penyisihan Tagihan TGR	(2.316.696.744)	(2.270.337.544)	Allowance for Indemnification Claims
Jumlah	-	-	Total

Saldo tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 seluruhnya berasal dari Sekretariat Jenderal.

Balance of indemnification claims (TGR) on December 31, 2014 and 2013 entirely from the Secretariat-General.

Perubahan penyisihan tagihan TGR adalah sebagai berikut:

Changes in allowance of indemnification claims (TGR) are as follows:

	31 Desember/ December 31,		
	2014	2013	
Saldo awal	2.270.337.544	1.805.083.257	Beginning balance
Penyisihan tagihan TGR selama tahun berjalan	125.000.000	97.171.296	Allowance for indemnification claims during the year
Pembalikan penyisihan tagihan TGR	(126.000.000)	(156.333.333)	Reversal of the allowance for indemnification claims
Reklasifikasi	1.000.000	59.162.037	Reclassification
Penyesuaian kurs	46.359.200	465.254.287	Foreign exchange rate adjustment
	2.316.696.744	2.270.337.544	

13. Aset Lainnya

Other Assets 13.

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	31 Desember/ December 31,		
	2014	2013	
Aset Tidak Berwujud	102.622.959.523	90.965.279.408	Intangible Assets
Aset Lain-lain	12.759.055.169	15.338.874.674	Other Assets
Akumulasi Penyusutan	(10.113.261.623)	(8.851.743.350)	Accumulated Depreciation
Jumlah	105.268.753.069	97.452.410.732	Total

Aset lain-lain merupakan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan.

Other assets are Fixed Assets not used in operations administration.

Mulai tahun 2013 dilakukan penerapan penyusutan atas aset lain-lain sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintahan Pusat.

Start in 2013, BPK RI has made the application of the depreciation of other assets in accordance with the Regulation of Minister of Finance No. 1/PMK.06/2013 on State Assets Depreciation of Fixed Assets in the form of Central Government Entities.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2014 DAN 2013

THE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014 AND 2013

14. Kewajiban Jangka Pendek

Short Term- Liabilities 14.

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

a. Utang kepada Pihak Ketiga

Account Payable - Third Parties a.

Utang kepada pihak ketiga berdasarkan Satuan Kerja (Satker) adalah sebagai berikut :

Account payable - third parties based on working unit are as follows :

	31 Desember/ December 31,		
	2014	2013	
Sekretariat Jenderal	46.327.684.905	36.058.880.957	Secretariate General
Pusdiklat	187.001.077	79.249.666	Education and Training Center
Perwakilan Aceh	15.765.770	5.307.289	Representative Office in Aceh
Perwakilan Sumatera Utara	203.622.479	140.078.125	Representative Office in North Sumatera
Perwakilan Sumatera Barat	78.086.439	57.365.322	Representative Office in West Sumatera
Perwakilan Riau	131.699.393	43.151.203	Representative Office in Riau
Perwakilan Kepulauan Riau	88.599.161	66.114.551	Representative Office in Kepulauan Riau
Perwakilan Sumatera Selatan	17.605.648	54.964.956	Representative Office in South Sumatera
Perwakilan Jambi	86.404.252	62.267.716	Representative Office in Jambi
Perwakilan Bangka Belitung	55.568.826	25.360.812	Representative Office in Bangka Belitung
Perwakilan Bengkulu	49.883.621	53.958.551	Representative Office in Bengkulu
Perwakilan Lampung	56.991.733	24.375.603	Representative Office in Lampung
Perwakilan DKI Jakarta	308.648.159	230.954.298	Representative Office in DKI Jakarta
Perwakilan Banten	103.761.996	100.063.539	Representative Office in Banten
Perwakilan Jawa Barat	93.876.977	14.543.000	Representative Office in West Java
Perwakilan DIY	10.638.910	279.934	Representative Office in DIY
Perwakilan Jawa Tengah	104.573.073	85.549.032	Representative Office in Central Java
Perwakilan Jawa Timur	307.459.035	171.034.001	Representative Office in East Java
Perwakilan Kalimantan Barat	38.902.263	30.757.249	Representative Office in West Borneo
Perwakilan Kalimantan Tengah	51.427.866	39.071.254	Representative Office in Central Borneo
Perwakilan Kalimantan Selatan	82.598.442	43.734.368	Representative Office in South Borneo
Perwakilan Kalimantan Timur	63.612.291	49.867.410	Representative Office in East Borneo
Perwakilan Bali	53.440.417	56.462.340	Representative Office in Bali
Perwakilan Nusa Tenggara Barat	86.415.313	46.020.791	Representative Office in West Nusa Tenggara
Perwakilan Nusa Tenggara Timur	37.603.986	49.564.088	Representative Office in East Nusa Tenggara
Perwakilan Sulawesi Barat	49.556.559	41.040.050	Representative Office in West Celebes
Perwakilan Sulawesi Tengah	51.890.807	39.369.966	Representative Office in Central Celebes
Perwakilan Sulawesi Utara	125.869.216	72.512.237	Representative Office in North Celebes
Perwakilan Sulawesi Selatan	151.690.275	94.526.704	Representative Office in South Celebes
Perwakilan Sulawesi Tenggara	5.943.939	-	Representative Office in Southeast Celebes
Perwakilan Gorontalo	57.973.504	44.952.013	Representative Office in Gorontalo
Perwakilan Maluku	71.469.179	235.070.474	Representative Office in Maluku
Perwakilan Maluku Utara	4.253.680	-	Representative Office in North Maluku
Perwakilan Papua	9.560.000	-	Representative Office in Papua
Perwakilan Papua Barat	73.859.994	105.274.972	Representative Office in West Papua
Jumlah	49.243.939.185	38.221.722.471	Total

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2014 DAN 2013

THE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014 AND 2013

14. Kewajiban Jangka Pendek (lanjutan)

Short Term- Liabilities (continued) 14.

b. Pendapatan Diterima Dimuka

Unearned Revenues b.

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2014 terdiri dari:

The balances of Unearned Revenues are as follows:

No.	Kode Akun	Uraian/ Description	2014	2013
1	423142	Sekretariat Jenderal / Secretariate General:		
		Sewa Gedung, Bangunan, dan Gudang/ <i>Building, Properties, and Warehouse Lease</i> (PT Tara Telco dan PT Telkom Indonesia)	963.792.695	156.562.704
2	423142	Sewa Penempatan ATM Bank BNI / <i>ATM Placement rental by Bank BNI</i>	-	12.754.445
		Sewa Penempatan ATM oleh Bank BNI / <i>ATM Placement rental by Bank BNI</i>		
3	423142	Perwakilan Prov. Jawa Timur / <i>Representative Office in East Java</i>	7.216.700	21.769.693
4	423142	Perwakilan Prov. Bangka Belitung / <i>Representative Office in Bangka Belitung</i>	23.309.589	35.309.589
5	423142	Perwakilan Prov. Riau / <i>Representative Office in Riau</i>	-	3.990.526
6	423142	Perwakilan Prov. Kalimantan Tengah / <i>Representative Office in Central Borneo</i>	38.091.243	59.883.255
7	423142	Perwakilan Prov. Aceh / <i>Representative Office in Aceh</i>	19.990.859	-
8	423142	Perwakilan Prov. Sumatera Utara / <i>Representative Office in North Sumatera</i>	33.373.336	-
9	423142	Perwakilan Prov. Sumatera Barat / <i>Representative Office in West Sumatera</i>	23.234.996	-
10	423142	Perwakilan Prov. Kep. Riau / <i>Representative Office in Kep. Riau</i>	3.990.526	-
11	423142	Perwakilan Prov. Jambi / <i>Representative Office in Jambi</i>	17.422.917	-
12	423142	Perwakilan Prov. Lampung / <i>Representative Office in Lampung</i>	825.000	-
13	423142	Perwakilan Prov. Banten / <i>Representative Office in Banten</i>	20.161.644	-
14	423142	Perwakilan Prov. Jawa Tengah / <i>Representative Office in Central Java</i>	44.137.034	-
15	423142	Perwakilan Prov. DI Yogyakarta / <i>Representative Office in DI Yogyakarta</i>	23.320.548	-
16	423142	Perwakilan Prov. Kalimantan Timur / <i>Representative Office in East Borneo</i>	20.676.335	-
17	423142	Perwakilan Prov. Sulawesi Tengah / <i>Representative Office in Central Celebes</i>	60.000.000	-
18	423142	Perwakilan Prov. Sulawesi Tenggara / <i>Representative Office in South-East Celebes</i>	31.340.000	-
Jumlah/ Total			1.330.883.422	290.270.212

Akun pendapatan sewa diterima di muka timbul pada saat BPK RI telah menerima pembayaran atas suatu pemberian jasa/fasilitas/pelayanan yang diberikan oleh pihak ketiga dan pembayaran sudah disetor ke Rekening Kas Umum Negara. Pada posisi 31 Desember 2014 masih terdapat barang/jasa/fasilitas dari BPK RI yang belum dinikmati pihak ketiga.

Advance Revenues Accounts are from payment that has been received by BPK RI for the provision of services / facilities / services provided by third parties and payment is deposited into the Central Government Cash Account . On December 31, 2014 there is still goods/ services/ facilities of BPK RI that not been used by the third party.

c. Uang Muka dari KPPN

Advance Payment from KPPN c.

Saldo uang muka dari KPPN pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebesar Rp23.184.516.607,00 dan Rp34.371.562.641,00.

Advances Payment from KPPN as of December 31, 2014 and 2013 amounted Rp23.184.516.607,00 and Rp34.371.562.641,00.

d. Pendapatan yang Ditangguhkan

Deferred Revenues d.

Saldo pendapatan yang ditangguhkan pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebesar Rp4.133.165.469 dan Rp2.255.840.290.

Deferred Revenues Balance as of December 31, 2014 and 2013 amounted Rp4.133.165.469 and Rp2.255.840.290.

Saldo pendapatan yang ditangguhkan merupakan pendapatan negara yang belum disetor ke Kas Negara yang dananya tersedia di Bendahara Pengeluaran dan disajikan sebagai Kas Lainnya dan Setara Kas.

The balance of Deferred Revenue represents income countries that have not paid into the State Treasury of funds available in the Treasurer and presented as Cash Expenditures Other and Cash Equivalents.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2014 DAN 2013**

**THE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014 AND 2013**

15. Ekuitas Dana Lancar

Current Equity 15.

Akun ini merupakan kekayaan bersih pemerintah sebagai selisih antara nilai aset lancar dengan kewajiban jangka pendek dengan rincian sebagai berikut:

This account represents net assets of the government which constitutes the difference between the value of current assets and current/ short-term liabilities with the following details:

	31 Desember/ December 31,	
	2014	2013
Cadangan Piutang	1.389.679.936	6.150.817.534
Cadangan Persediaan	16.030.405.208	19.150.915.144
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Hutang Jangka Pendek	(47.082.636.425)	(35.820.702.512)
Barang/ Jasa yang Harus Diterima	217.935.589	611.084.773
Barang/ Jasa yang Harus Diserahkan	(1.330.883.422)	(290.270.212)
Jumlah	(30.775.499.114)	(10.198.155.273)

Equity from Receivables
Equity from Inventories
Deducted equity for payment of current liability
Deferred Goods/Services
Sent Goods/Services
Total

16. Ekuitas Dana Investasi

Investment Equity 16.

Akun ini merupakan dana yang diinvestasikan dalam aset tetap dan aset lainnya dengan rincian sebagai berikut:

This account represents fund invested in fixed asset and other assets with the following details:

	31 Desember/ December 31,	
	2014	2013
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	4.106.107.771.522	3.973.848.035.207
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	105.268.753.069	97.452.410.732
Jumlah	4.211.376.524.591	4.071.300.445.939

Equity from Fixed Assets
Equity from Other Assets
Total

17. Informasi Penting Lainnya

Other Significant Informations 17.

a. Australian Agency International Development (AusAID)

Australian Agency International Development (AusAID)

a.

Hibah AusAID-GPF 2 dengan Nomor Register 71012601 dan nomor PPHLN Grant Agreement ROU 38710 yang ditandatangani pada tanggal 2 Agustus 2010, mulai efektif (tentatif) sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 30 Desember 2014 dengan alokasi komitmen hibah sebesar AUD799.878.

AusAID grant-GPF 2 with Register No. 71012601 and No. 38710 ROU NPPHLN Grant Agreement signed on August 2, 2010 became effective (tentative) from January 1, 2012 until December 30, 2014 with the allocation of a grant commitment of AUD799.878.

Hibah dalam bentuk technical assistance tersebut memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kapabilitas dan kapasitas auditor BPK RI dalam melakukan pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan keuangan.

The grant is in the form of technical assistance has the primary objective to increase the capability and capacity of the BPK RI auditors in conducting performance audit and financial audit.

Selama Tahun 2014 telah dilaksanakan berbagai kegiatan yaitu :

During 2014, the activities are as follows:

- 1) Satu orang Deployment Senior Officer ANAO di BPK RI sebagai Subject Matter Expert (SME) bidang pemeriksaan Kinerja;
- 2) Partisipasi delegasi BPK RI dalam ACAG and ACPAC Conference di Sydney Australia;
- 3) Kunjungan delegasi ANAO sebanyak dua kali, masing-masing ke BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara dalam rangka workshop pemeriksaan kinerja (bersama SME);
- 4) Kunjungan Delegasi BPK RI ke ANAO dalam rangka Pengembangan Kertas Kerja Elektronik, Audit TI, Pemeriksaan Laporan Keuangan Berbasis Akrua, dan QA sebanyak satu kali;
- 5) Kunjungan dua orang delegasi ANAO ke Jakarta untuk berdiskusi dan berbagi pengalaman bidang QA pemeriksaan keuangan, atas pilot project QA di Perwakilan Sumatera Selatan dan D.I Yogyakarta sebanyak satu kali;
- 6) Teleconference DFAT dengan biro Humas dan Luar Negeri BPK RI dalam rangka Monitoring & Evaluation implementasi GPF di BPK RI pada 2012 sebanyak satu kali;

- 1) *One of Senior Deployment Officer ANAO in BPK RI as a Subject Matter Expert (SME) Performance Audit*
- 2) *Participation of BPK RI delegation's in the ACAG and ACPAG Conference in Sydney, Australia*
- 3) *ANAO delegation visits twice, on BPK RI Representative Office of Central Borneo and North Sumatra in order to Performance Audit Workshop (with SME);*
- 4) *BPK RI delegation visits to ANAO in order to Electronic Working Paper Development, IT Audit, Auditing for Accrual Based Financial Statements, and QA, as many as one time;*
- 5) *Visits of two ANAO delegations in Jakarta to discuss and sharing experiences on QA audits, above QA pilot project in BPK RI Representatives Office in South Sumatra and DI Yogyakarta, as many as one-time;*
- 6) *DFAT teleconference with Public Relations and Foreign Affairs Bureau of BPK RI in the framework of Monitoring & Evaluation the implementation GPF in BPK RI in 2012 as many as one-time;*

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2014 DAN 2013**

**THE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014 AND 2013**

17. Informasi Penting Lainnya (lanjutan)

Other Significant Informations (continued) 17.

- 7) Wawancara dengan tim independen dan presentasi hasil review dalam rangka Mid-term Review Program GPF II DFAT;
 - 8) Secondment tenaga Ahli BAKN ke JCPAA Australia sebanyak satu kali
- Kegiatan-kegiatan tersebut belum disahkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) pada kementerian Keuangan karena belum diserahkan oleh AusAID kepada BPK RI secara administratif dalam bentuk BAST dan akan di BAST kan serta disahkan pada tahun anggaran berikutnya.

- Interview with an independent team and the presentation of the results of the review in order to Mid-term Review of the GPF II Program DFAT;* 7)
- Experts Secondment BAKN to JCPAA Australia, as many as one-time;* 8)
- The above activities have not been approved by the Directorate General of Debt Management (DJPU) in the Ministry of Finance, because it has not been handed over by AusAID to BPK RI administratively in the form of Certificate of Acceptance (BAST), and will be done in the next financial year.* 9)

b. United State Agency International Development (USAID)

United State Agency International Development (USAID)

b.

Pada tahun 2014 BPK RI telah melaksanakan kegiatan Strengthening Integrity and Accounting Project I (SIAP) yang didanai dari hibah USAID. Hibah dengan nomor NPPHLN 497-026 dan nomor register 71158801 yang ditanda tangain serta mulai efektif pada 30 september 2014 mendapatkan komitmen hibah sebesar USD4.483.574.

In 2014 BPK has been carried out activities out on Strengthening Integrity and Accounting Project I (SIAP I) which funded by USAID grant. This Grant NPPHLN with No. 497-026 and No. NPPHLN Register 71158801 signed and became effective on September 30, 2009 until September 30, 2014 for USD4.483.574 commitment.

Hibah ini bertujuan untuk mendukung BPK RI sebagai lembaga utama terkait akuntabilitas dalam meningkatkan integritas dan akuntabilitas Pemerintahan RI. Sasaran utama hibah ini adalah membantu pengembangan Fraud Control System (FCS) BPK RI.

This grants aims to support the BPK RI as the lead agency related on increase the Integrity and Accountability in Government of the Republic of Indonesia. The main target of this grant is to assist the development of Fraud Control syarem (FCS) BPK RI.

Kegiatan yang dibiayai oleh Hibah USAID antara lain :

The activity funded by USAID Grant, among others:

- 1) Pengidentifikasian kegiatan yang dibutuhkan terkait pelaksanaan SIAP 1 (*Scoping Mission and identifying activities needs to proposed*) pada bulan Februari 2013;
- 2) Penyempurnaan Manual Implementasi Sistem Kendali Kecurangan (FCS) pada bulan Februari 2013;
- 3) Penyusunan modul pelatihan FRA Supervisory bulan Februari 2013;
- 4) Pelaksanaan seminar sehari '*Sharing experiences on Peer Review*' untuk 100 orang peserta pada 16 April 2013.
- 5) Pelatihan '*Peer review*' selama lima hari untuk 36 orang peserta dalam rangka mempersiapkan '*BPK Peer Review*' tahun 2014 pada 18-19 dan 22-24 April 2013;
- 6) Pelatihan '*Digital Forensic Audit*' selama lima hari untuk 28 orang pada 20-24 Mei 2013;
- 7) Pelatihan Manual Implementasi Sistem Kendali Kecurangan selama 3 hari untuk 73 orang pada 19-21 & 26-28 Agustus 2013;
- 8) Pelatihan Pemetaan Risiko Kecurangan selama 3 hari untuk 76 orang pada 19-21 & 26-28 Agustus 2013;
- 9) Pelatihan '*GAO Practices in Performance Auditing*' selama 5 hari untuk 92 orang pada 2-6 & 9-13 September 2013;
- 10) Pelatihan '*Alternative Dispute Resolution Techniques*' selama 2 hari untuk 18 orang pada 1-2 Oktober 2013;
- 11) Membantu Inspektorat Utama dalam melaksanakan Pemetaan Risiko Kecurangan pada 24 Juni 2013 sampai dengan 31 Desember 2014;
- 12) Pelaksanaan assesment dan merekomendasikan perbaikan terhadap buku roapmap penerapan business Process Management di BPK RI pada 1 Agustus 2013 sampai dengan 30 September 2013;

- Identification of required activities related to the implementation of the SIAP 1 (Scoping Mission and identifying activities needs to proposed) in February 2013;* 1)
- Completion of Fraud Control System (FCS) Implementation Manual in February 2013;* 2)
- Preparation of training modules 'Supervisory FRA' in February 2013;* 3)
- One day seminar "Sharing experiences on Peer Review" to 100 participants on April 16, 2013;* 4)
- Training 'Peer review' for five days to 36 participants in order to prepare Your "CPC Peer Review" in 2014 at 18-19 and April 22 to 24, 2013;* 5)
- Training "Digital Forensic Audit" for five days to 28 people on May 20 to 24, 2013;* 6)
- Training Manual Control System Implementation Cheating for 3 days for 73 people on 19-21 & August 26 to 28, 2013;* 7)
- Fraud Risk Mapping training for 3 days for 76 people at 19-21 & August 26 to 28, 2013;* 8)
- Training 'GAO Practices in Performance Auditing' for 2 days for 92 people at 2-6 & September 9 to 13, 2013;* 9)
- Training 'Alternative Dispute Resolution Techniques' for 2 days for 18 people at 1-2 October 2013;* 10)
- Main Inspectorate assist in implementing the Fraud Risk Mapping on June 24, 2013 until December 31, 2014;* 11)
- Implementation assessment and recommend improvements to the implementation Roadmap book business Process Management in the BPK RI on August 1, 2013 to September 30, 2013;* 12)

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2014 DAN 2013**

**THE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014 AND 2013**

17. Informasi Penting Lainnya (lanjutan)

Other Significant Informations (continued) 17.

13) Pelatihan 'Business Process Management' selama lima hari untuk 20 orang staf Direktorat Penelitian dan Pengembangan pada 9-13 September 2013;

Training 'Business Process Management' for five days for 20 staff of the Directorate of Research and Development on September 9 to 13, 2013;

14) Pelaksanaan produksi 3 film pendek berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK atas dana Bantuan Operasional Sekolah, Pengelolaan Haji, dan Tenaga Kerja Indonesia pada 7 Juli 2013 sampai dengan 28 Februari 2014.

Implementation of production of three short films based on the result of BPK report over school operational funds, Managed Hajj, and the Indonesian Labour on July 7, 2013 until February 28, 2014.

Kegiatan kegiatan tersebut belum disahkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) pada kementerian Keuangan karena belum diserahkan oleh USAID kepada BPK RI secara administratif dalam bentuk BAST dan akan di BAST kan serta disahkan pada tahun anggaran berikutnya.

The above activities have not been approved by the Directorate General of Debt Management (DJPU) in the Ministry of Finance, because it has not been handed over by USAID to BPK RI administratively in the form of Certificate of Acceptance (BAST) and will be done in the next financial year.

18. Penyelesaian Laporan Keuangan

Completion of Financial Statements 18.

Manajemen BPK RI bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan ini yang telah diselesaikan pada tanggal 22 Mei 2015.

The Management of BPK RI is responsible for the preparation of the financial statements that were completed on May 22, 2015.